



LAPORAN KINERJA

2025

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian



LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TAHUN 2025

Tim Penyusun:

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN LAMPUNG
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi atas penggunaan anggaran. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk upaya perbaikan kesinambungan bagi BRMP Lampung untuk meningkatkan kinerjanya khususnya dalam mendukung pembangunan pertanian di wilayah Lampung.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Melalui laporan ini, kami menyampaikan hasil capaian kinerja serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program modernisasi pertanian sepanjang tahun 2025.

Terlepas dari berbagai target yang telah dicapai, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menjadi kendala di lapangan. Hal tersebut menjadi catatan dan evaluasi penting bagi kami untuk segera ditindaklanjuti dan menjadi perbaikan di tahun mendatang. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas kontribusinya terhadap kemajuan BRMP Lampung. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian yang lebih modern serta dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan kinerja di tahun mendatang.



Bandar Lampung, Desember 2025

Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.

NIP 197412221999031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan secara teknis dibina oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) yang menjalankan tugas dan fungsinya di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP terdiri dari Sekretariat Badan dan 4 Pusat Perakitan dan Modernisasi. Organisasi Unit Pelaksana Teknis BRMP diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BRMP Lampung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Rencana Strategis BRMP Tahun 2025–2029, tujuan BRMP adalah mendukung penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha serta mendorong pemanfaatan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, pada Tahun 2025 BRMP Lampung melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan pada penerapan standar pertanian, penyediaan benih/bibit sumber spesifik lokasi, penguatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI), serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diimplementasikan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan, pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan, serta penguatan dukungan manajemen.

Hasil pengukuran capaian kinerja BRMP Lampung Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) telah tercapai. Penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani terealisasi sesuai target, produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi mencapai 130,63 ton dari target 120 ton, nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM mencapai 84,49 dari target 82,11, serta nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 93,82 dari target 91. Secara umum, capaian kinerja BRMP Lampung berada pada kategori berhasil dan sangat berhasil, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, BRMP Lampung menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait perubahan nomenklatur kelembagaan dari BSIP menjadi BRMP yang berdampak pada penyesuaian administrasi, perencanaan, dan penganggaran. Selain itu, adanya sebagian anggaran yang diblokir serta keterlambatan efektivitas anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan

baru dapat berjalan optimal pada pertengahan tahun, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi relatif terbatas dan menuntut optimalisasi sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan secara bersamaan. Kendala tersebut telah diantisipasi melalui penyesuaian perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal.

Ke depan, upaya peningkatan kinerja BRMP Lampung akan difokuskan pada penguatan perencanaan sejak awal tahun, peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja, optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, serta percepatan digitalisasi proses bisnis dan layanan publik. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, peningkatan kualitas pengelolaan benih sumber, serta konsistensi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja BRMP Lampung secara berkelanjutan dalam mendukung modernisasi pertanian dan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Kondisi Demografi Satker	5
1.5. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan	9
2.4. Sasaran Umum Kebijakan	10
2.5. Kegiatan Utama	11
2.6. Perjanjian Kinerja (PK) 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Pengukuran Kinerja	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	16
3.3. Capaian Kinerja Lainnya	44
3.4. Akuntabilitas Keuangan	73
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kegiatan BRMP Lampung Tahun 2025	11
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Lampung 2025	12
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Lampung 2025 (PK revisi 1) ...	13
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Lampung 2025 (PK revisi 2) ...	13
Tabel 5.	Capaian Kinerja BRMP Lampung Tahun 2025	15
Tabel 6.	Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas BRMP Lampung Tahun 2025	37
Tabel 7.	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) selama 5 tahun terakhir.....	39
Tabel 8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025.....	40
Tabel 9.	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam 5 tahun terakhir.....	43
Tabel 10.	Rekapitulasi fasilitasi lapang BRMP pada Program Swasembada Pangan tahun 2025.....	50
Tabel 11.	Capaian PDO pada indikator “Mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan dan finansial”	58
Tabel 12.	Capaian PDO Komponen A : Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian	59
Tabel 13.	Capaian PDO Komponen B : Penguatan Kapasitas Institusi Untuk Pengelolaan Rantai Nilai.....	60
Tabel 14.	Capaian PDO Komponen C: Manajemen Program	61
Tabel 15.	Pembuatan Larutan Stok Makro, Mikro, Vit. MS, dan NaOH	62
Tabel 16.	Pembuatan Larutan Stok Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)	63
Tabel 17.	Rekapitulasi perkembangan pembuatan media	64
Tabel 18.	Rekapitulasi perkembangan subkultur.....	65
Tabel 19.	Rekapitulasi Aklimatisasi	66
Tabel 20.	Pembuatan Stok Alkohol 70%	67
Tabel 21.	Rekapitulasi Komoditas Laboratorium Kultur Jaringan	67
Tabel 22.	Penyajian informasi melalui website dan media sosial	71
Tabel 23.	Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa Praktek Kerja lapang di BRMP Lampung 2025	72
Tabel 24.	Jumlah Layanan Laboratorium Tanah tahun 2025.....	73
Tabel 25.	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025	74
Tabel 26.	Penerimaan dan Realisasi PNBK BRMP Lampung Bulan Desember 2025.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	4
Gambar 2.	Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian	5
Gambar 3.	Sebaran Jabatan Fungsional Tertentu.....	6
Gambar 4.	Sebaran Jabatan Pelaksana	6
Gambar 5.	Koperasi Srikandi Maju Bersama Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.....	17
Gambar 6.	Pedoman Budidaya Kopi Robusta Spesifik Lampung	18
Gambar 7.	Pendampingan Penerapan GAP Budidaya Kopi pada Petani Keanggotaan Koperasi Srikandi	19
Gambar 8.	Praktik Petik merah dan pengelolaan buah kering	20
Gambar 9.	Proses sortasi biji kopi.....	21
Gambar 10.	Proses roasting biji kopi.....	21
Gambar 11.	Proses pengemasan kopi	21
Gambar 12.	Penerapan Modernisasi Pengolahan Kopi di Koperasi Srikandi	22
Gambar 13.	Penerapan Sistem Budidaya Intergasi Kopi Kambing pada keanggotaan Koperasi Srikandi	22
Gambar 14.	Pedoman Budidaya Kambing Terintegrasi Kebun Kopi	23
Gambar 15.	Pembuatan pakan ternak kambing berbahan lokal	23
Gambar 16.	Pengelolaan dan pengolahan limbah kotoran kambing.....	24
Gambar 17.	Grafik perkembangan produksi benih padi dalam 5 tahun terakhir	25
Gambar 18.	Koordinasi dan Sosialisasi Perbenihan Padi Ke Dinas Kabupaten.....	26
Gambar 19.	Benih sumber padi pada kegiatan perbenihan padi.....	27
Gambar 20.	Distribusi benih ke lokasi kegiatan pada kegiatan perbenihan padi.....	28
Gambar 21.	Penanaman menggunakan trasplanter pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Mesuji	29
Gambar 22.	Pelaksanaan rouging dan pengendalian OPT pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Mesuji	29
Gambar 23.	Pendampingan penanaman secara pindah tanam biasa pada Kegiatan perbanyak benih padi di Kabupaten Pesawaran.....	30
Gambar 24.	Pelaksanaan rouging dan pengendalian OPT pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Pesawaran	31
Gambar 25.	Pelaksanaan panen menggunakan combine hasvester dan penyimpanan benih pada Kegiatan perbanyak benih padi di Kabupaten Pesawaran	32
Gambar 26.	Pendampingan Pembuatan persemaian, aplikasi kapur dan pengolahan tanah pada Kegiatan perbanyak benih padi di Kabupaten Lampung Utara	32

Gambar 27. Pelaksanaan rouging dan pengendalian OPT pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Lampung Utara	33
Gambar 28. Pelaksanaan panen menggunakan combine hasvester pada Kegiatan perbanyakan benih padi di Kabupaten Lampung Utara	33
Gambar 29. Pendampingan pengolahan lahan dan penanaman secara tabela pada Kegiatan perbanyakan benih padi di IP2MP Natar BRMP Lampung	34
Gambar 30. Pelaksanaan panen menggunakan combine hasvester pada Kegiatan perbanyakan benih padi di IP2MP Natar	35
Gambar 31. Pembinaan produksi benih pada kegiatan perbenihan padi	35
Gambar 32. Pembinaan kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Mesuji	35
Gambar 33. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan pada kegiatan perbenihan padi di Kab. Lampung Utara	36
Gambar 34. Stok benih Biosalin 1 dan Biosalin 2 di gudang UPBS BRMP Lampung	36
Gambar 35. Sebaran nilai NKA/IKPA dalam 5 tahun terakhir	43
Gambar 36. Grafik perbandingan RPD dan realisasi per bulan	44
Gambar 37. Grafik perbandingan RPD dan realisasi kumulatif TA 2025	44
Gambar 38. Capaian Sasaran Pendampingan Swasembada Pangan	45
Gambar 39. Jumlah Sasaran Pendampingan Program Strategis Kementan Berdasarkan Profesi	47
Gambar 40. Capaian Jumlah sasaran pendampingan Per Evaluasi Agustus 2025 dan Keragaan Asal Instansi Narasumber.....	49
Gambar 41. Rekapitulasi perkembangan pembuatan media selama 12 bulan	65
Gambar 42. Rekapitulasi perkembangan subkultur selama 12 Bulan	66
Gambar 43. Kondisi planlet pisang Barangan Merah, pada gambar a planlet belum siap aklimatisasi (kiri) dan planlet siap aklimatisasi (kanan), sedangkan pada gambar b jumlah planlet yang telah siap aklimatisasi.	68
Gambar 44. Kondisi planlet pisang Raja Bulu, pada gambar a dan b tahap inisiasi, gambar c setelah 1 bulan inisiasi, sedangkan pada gambar d tahap multiplikasi	69
Gambar 45. Penerimaan penghargaan Unit Kerja Eselon III Informatif	70
Gambar 46. Sertifikat penghargaan Unit Kerja Eselon III	70
Gambar 47. Tampilan Lateras	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi	77
Lampiran 2.	Data Kepegawaian	77
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP 2025 (PK awal).....	80
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja (PK) BRMP 2025 (PK revisi 1)	83
Lampiran 5.	Perjanjian Kinerja (PK) BRMP 2025 (PK revisi 2)	86
Lampiran 6.	Komitmen Realisasi Anggaran.....	89
Lampiran 7.	Manual IKU	90
Lampiran 8.	SK Penetapan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) ...	97
Lampiran 9.	SK Tim Penyusunan LAKIN	104
Lampiran 10.	Nilai IKPA (sumber: https://monev.kemenkeu.go.id/) ...	107

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan secara teknis dibina oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) yang menjalankan tugas dan fungsinya di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP terdiri dari Sekretariat Badan dan 4 Pusat Perakitan dan Modernisasi. Organisasi Unit Pelaksana Teknis BRMP diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Institusi ini telah mengalami proses yang panjang dalam bertransformasi hingga pada akhirnya menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Pada mulanya, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) nomor 798/Kpts/OT.210/12/94 tanggal 13 Desember 1994, dibentuklah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang merupakan UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di daerah. Pada tahun 2022, berdasar Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian, Badan Litbang Pertanian bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP). Pada tahun 2025, arah kebijakan pembangunan pertanian nasional semakin menekan pentingnya modernisasi pertanian. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, BSIP bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Sebagai UPT eselon III di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BRMP Lampung menjalankan peran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Tugas utamanya adalah melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta memimpin upaya modernisasi pertanian di wilayah Lampung. Peran tersebut menjadi penting

mengingat sektor pertanian di Provinsi Lampung masih menghadapi kendala seperti produktivitas yang belum optimal, pengaruh perubahan iklim, serta kelembagaan usaha tani yang belum kuat sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan petani.

Dalam operasionalnya, BRMP Lampung menjalankan fungsi yang mencakup penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pengujian, hingga diseminasi model pertanian modern. BRMP juga bertanggung jawab dalam memproduksi benih atau bibit sumber, melakukan penilaian kesesuaian, serta mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tepat untuk petani setempat. Selain itu, BRMP Lampung aktif memberikan pendampingan program pembangunan pertanian dan bimbingan teknis terkait hasil perakitan teknologi agar dapat diterapkan secara luas. Seluruh rangkaian fungsi ini, termasuk pemantauan, evaluasi, serta urusan tata usaha balai, dilaporkan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) Tahun 2025 menjadi sarana untuk melihat sejauh mana tugas dan fungsi tersebut telah tercapai di lapangan. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata atas pelaksanaan misi organisasi dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Melalui pelaporan yang transparan dan terukur, BRMP Lampung berupaya mewujudkan tata kelola perkantoran yang bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme untuk mendorong kemajuan pertanian di Lampung.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pembaharuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 tanggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Institusi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang kementerian Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta dalam pelaksanaannya secara teknis dibina oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP).

B. Tugas Pokok

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, secara struktural Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Jabatan fungsional dan pelaksana diatur dalam Keputusan Menteri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup UPT Kementerian Pertanian, Tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri dari dua tim, yakni Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Pendampingan Modernisasi

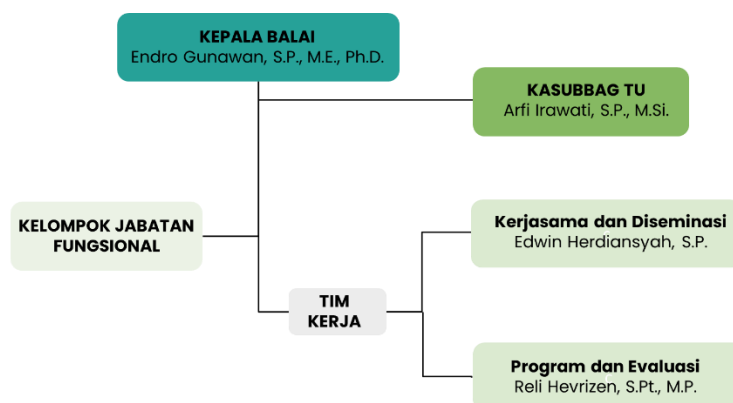
Pertanian; dan Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Pendampingan Modernisasi Pertanian memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- Melakukan pendampingan program pembangunan pertanian;
- Melakukan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- Melakukan pengujian paket teknologi spesifik lokasi.

Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- Melakukan produksi benih/bibit sumber, pengelolaan unit pengelola benih/bibit sumber dan kebun instalasi serta penilaian kesesuaian;
- Melakukan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

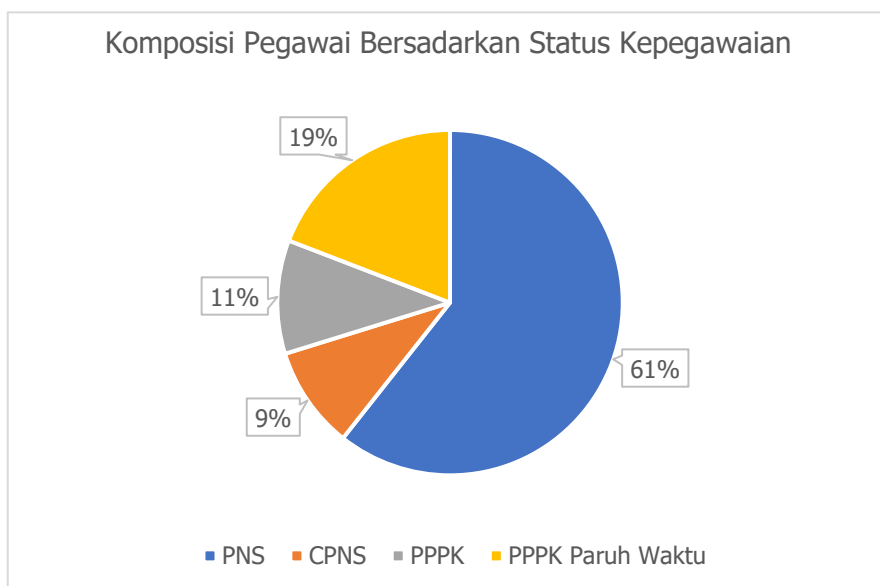
Keanggotaan Tim kerja lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meliputi jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Jumlah dan jenjang jabatan fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Struktur organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada gambar 1.



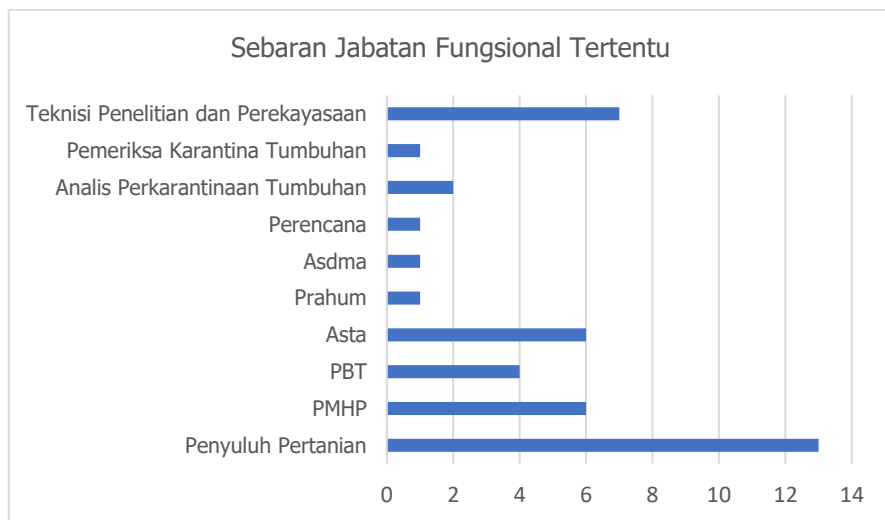
Gambar 1. Struktur organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung

1.4. Kondisi Demografi Satker

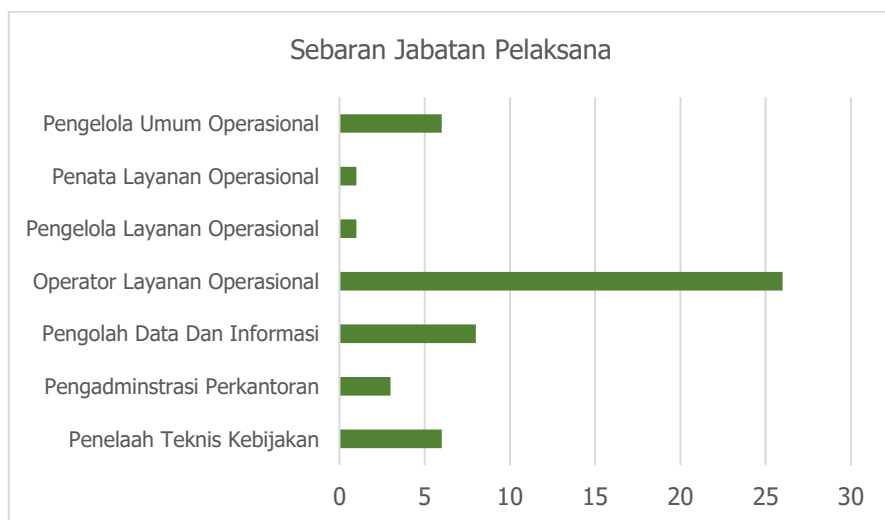
Secara demografis, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung terdiri dari dua personel yang menduduki jabatan struktural, 41 personel menduduki jabatan fungsional tertentu, dan 51 personel jabatan pelaksana. Jabatan struktural terdiri dari Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Jabatan Fungsional tertentu terdiri dari 29 PNS, 9 CPNS, dan 3 PPPK. Seluruh personel tersebut tersebar ke dalam sepuluh kelompok jabatan fungsional, yaitu Penyuluh Pertanian sebanyak 13 personel; Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sebanyak 6 orang; Pengawas Benih Tanaman (PBT) sebanyak 4 orang; Analis Standardisasi sebanyak 6 orang; Pranata Hubungan Masyarakat sebanyak 1 orang; Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (ASDMA) sebanyak 1 orang; Perencana sebanyak 1 orang; Analis Perkarantina Tumbuhan sebanyak 2 orang; Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebanyak 1 orang; dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa sebanyak 7 orang. Jabatan Pelaksana terdiri dari 26 PNS, 7 PPPK, dan 18 PPPK paruh waktu. Seluruh personel tersebut tersebar ke dalam tujuh kelompok jabatan pelaksana, yaitu Penelaah Teknis Kebijakan sebanyak 6 orang; Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 3 orang; Pengolah Data dan Informasi sebanyak 8 orang; Operator Layanan Operasional sebanyak 26 orang; Pengelola Layanan Operasional sebanyak 1 orang; Penata Layanan Operasional sebanyak 1 orang; dan Pengelola Umum Operasional sebanyak 6 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Gambar 2. Sebaran pegawai berdasarkan jabatan fungsional dan pelaksana dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.



Gambar 2. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian



Gambar 3. Sebaran Jabatan Fungsional Tertentu



Gambar 4. Sebaran Jabatan Pelaksana

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan aturan tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi (LAKIN) adalah sebagai berikut:

- Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, serta kondisi demografi organisasi.

- Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis organisasi berisi visi, misi, dan tujuan organisasi serta uraian Perjanjian Kinerja sejak terbitnya PK awal hingga PK terbaru.

- Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diberikan dua sub bab, yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

- D. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis BRMP Lampung sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan.

- E. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

- F. Capaian Kinerja Lainnya

Pada bab ini diuraikan capaian-capaian BRMP Lampung di luar dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

- G. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BRMP Lampung sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

- Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BRMP Lampung serta rekomendasi langkah yang diperlukan di masa mendatang yang akan dilakukan BRMP Lampung untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran

Lampiran terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi

Kementerian Pertanian sebagai salah satu kementerian negara berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah: "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian harus memberikan dampak positif dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon 3 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Sesuai dengan konsep renstra BRMP 2025-2029, BRMP Kementerian Pertanian memiliki visi "Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju".

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) sebagai Eselon 2 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) secara teknis membina Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung. Oleh karena itu, visi dan misi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung mengikuti visi dan misi dari Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP). Visi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) juga mengacu kepada visi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian dan visi Kementerian Pertanian. Visi BBPPMP adalah "Menjadi Lembaga Unggulan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan".

2.2. Misi

Berdasarkan visi tersebut, maka BRMP Lampung memiliki Misi yang merujuk pada Misi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP). Misi BBPPMP mengacu pada misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dan misi Kementerian Pertanian. Berikut ini adalah Misi BBPPMP, BRMP, dan Kementerian Pertanian:

Misi Kementerian Pertanian:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani;
2. Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian;
3. Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia;
4. Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia;
5. Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak langsung kepada Masyarakat.

Misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP):

1. Melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasa teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

Misi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP):

1. Melaksanakan perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian;
3. Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi;
4. Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian

2.3. Tujuan

Tujuan BRMP Lampung merujuk pada tujuan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP), yaitu:

1. Terlaksananya perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Terlaksananya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, (2) petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern;
3. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dengan indikator tujuan: (1) benih/bibit sumber spesifik lokasi;

4. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

2.4. Sasaran Umum Kebijakan

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) mengusung modernisasi pertanian berkelanjutan dengan inovasi teknologi yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Melalui penelitian, perakitan teknologi, mekanisasi, dan digitalisasi, BRMP membangun sistem pertanian yang cerdas, ramah lingkungan, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan. Sasaran kinerja BRMP Lampung tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani
2. Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif
3. Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani
4. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
5. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Adapun sasaran kinerja BBPPMP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.5. Kegiatan Utama

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BRMP Lampung menyelenggarakan tiga program, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; serta Program Dukungan Manajemen. Ketiga program tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan/rincian output yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BRMP Lampung Tahun 2025

Kode Akun	Kegiatan/Output/Suboutput	Target Output
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
7911.BJA.109	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	51 Sampel
7911.BJA.109.051.A	• Instrumen Pertanian yang diuji	
7911.QDB.101	Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment	1 Lembaga
7911.QDB.101	• Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	
018.09.HA	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
7912.RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	120 Ton
67912.RAG.102.051.A	• Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS	
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan
6918.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
6918.EB A.962	Layanan Umum	1 Layanan
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan

2.6. Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja Aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dsebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring; sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai; dan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Pada tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung mengalami berbagai dinamika kebijakan sehingga diperlukan adanya penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK). Dalam kurun waktu satu tahun, penyesuaian PK dilaksanakan sebanyak tiga kali. PK awal merupakan PK Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BPSIP Lampung dan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).. PK awal BRMP Lampung disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Lampung 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen Pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	-
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	80
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	85

Sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Permentan nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BPSIP Lampung mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung. Selain itu, pada pertengahan tahun 2025 BRMP Lampung mengalami pergantian kepemimpinan. Sejalan dengan hal tersebut perlu adanya penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK). PK ditandatangani oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung dan Kepala Badan

Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). PK revisi pertama disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Lampung 2025 (PK revisi 1)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (unit)	120
3	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	85

Sehubungan dengan disahkannya Peraturan Menteri Pertanian nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung mengalami peningkatan eselon yang sebelumnya merupakan UPT eselon III menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Lampung yang merupakan UPT eselon IIb di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Dalam rangka menunjang proses eselonisasi satuan kerja, perlu dilakukan penyesuaian PK, yaitu PK revisi kedua. PK ditandatangani oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung dan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada bulan Desember tahun 2025. PK BRMP Lampung revisi kedua disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Lampung 2025 (PK revisi 2)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani	1.1. Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan	1,00	Lembaga
2	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
		2.2. Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	120,00	Unit
3	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	3.1. Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	-	Orang
		LAINNYA		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	82,11	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	91,00	Nilai (0-100)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja BRMP Lampung diukur dengan membandingkan antara target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi yang sebenarnya. Dari lima sasaran kegiatan, secara keseluruhan terdapat enam indikator kinerja utama yang mana pada sasaran 2 dan 3 masing-masing terdapat dua indikator kinerja utama. Pada tahun 2025, BRMP Lampung belum ditargetkan untuk memenuhi indikator Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dan indikator Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern.

Pada tahun 2025, terdapat empat indikator yang targetnya harus dipenuhi, yaitu: jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan target 1 lembaga; jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan dengan target 120 unit; nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung dengan target nilai 82,11; dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung dengan target nilai 91. Secara keseluruhan, realisasi kinerja BRMP Lampung pada seluruh sasaran kegiatan telah memenuhi target. Empat capaian kinerja masuk ke dalam kriteria sangat berhasil (>100%) dan satu capaian kinerja dengan kriteria berhasil (80-100%), yaitu pada indikator jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan. Capaian kinerja BRMP Lampung tahun 2025 disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja BRMP Lampung Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani	1.1. Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan	1 (Lembaga)	1 (Lembaga)	100
2	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi	-
		2.2. Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	120 (unit)	130,63 (unit)	108,85
3	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	3.1. Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	-	Orang	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
		LAINNYA			
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	82,11	84,49	102,90
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	91,00	93,82	103,10

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Sasaran 1: Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani

Sasaran terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani memiliki satu indikator kinerja utama berupa jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan target tahun 2025 adalah satu lembaga. Pada indikator tersebut BRMP Lampung telah memenuhi target capaian sebesar 100%, yaitu pendampingan satu lembaga yang menerapkan standar pertanian. Kegiatan Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian dititikberatkan pada upaya penerapan dan penilaian kesesuaian yang digerakkan kelembagaan usaha tani di kawasan pertanian program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE). Kegiatan pendampingan berupa fasilitasi kesesuaian produknya dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan ditetapkan seperti (SNI/PTM/Standar mutu lainnya). Lembaga yang didampingi oleh BRMP Lampung adalah Koperasi Srikandi di Kabupaten Tanggamus.

Pada tahun 2024, terdapat indikator serupa, yaitu jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Target sasaran pada tahun tersebut adalah satu lembaga. Dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025 BRMP Lampung memenuhi target yang sama, yaitu satu lembaga. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja untuk indikator tersebut tidak terdapat penurunan maupun peningkatan. Target kinerja pada lima tahun ke depan diproyeksikan meningkat. Pada tahun 2026 hingga 2027, target capaian masih sama, yaitu satu lembaga.

Pada tahun 2028 hingga 2029, diproyeksikan target capaian meningkat, yaitu dua lembaga per tahun.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2025 adalah adanya pemblokiran anggaran pada sebagian besar anggaran BRMP Lampung. Khususnya pada program ICARE, seluruh anggaran diblokir dan baru mulai adanya pembukaan blokir pada triwulan III. Pemblokiran anggaran tersebut disebabkan karena adanya dinamika kebijakan yang berkaitan dengan transformasi kelembagaan, yaitu perubahan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan tersebut mengakibatkan sempitnya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan penyesuaian jadwal lintas komponen, kebutuhan sinkronisasi data dan pelaporan, serta kendala terkait anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program secara menyeluruh. Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu berdekatan menjadi tantangan signifikan bagi tim ICARE BRMP Lampung.



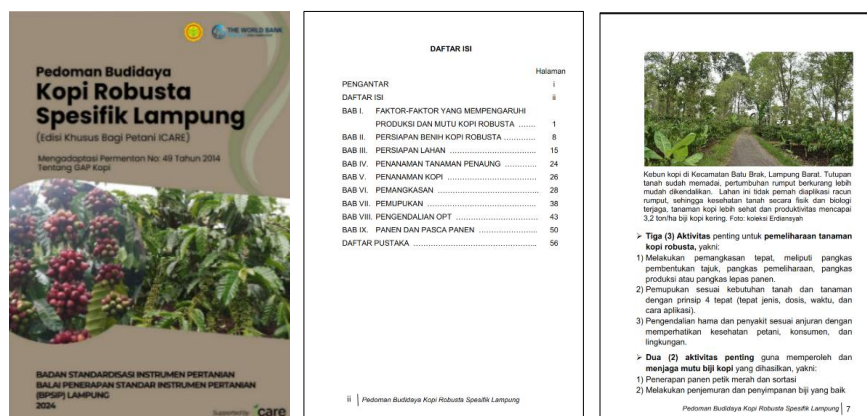
Gambar 5. Koperasi Srikandi Maju Bersama Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus

Terlepas dari kendala yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif telah dilaksanakan dalam upaya menghadapi kendala tersebut. Beberapa langkah strategis antara lain adalah perencanaan yang efektif, koordinasi stakeholder dan petani, peningkatan kesiapan pembukaan blokir anggaran, serta percepatan realisasi kegiatan. Melalui langkah-langkah tersebut, BRMP Lampung dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan penerapan standar pada Koperasi Srikandi dalam rangka memenuhi target capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

A. Pendampingan Penerapan Standar Budidaya Kopi pada Kebun Keanggotaan Koperasi Srikandi

BRMP Lampung telah melaksanakan kegiatan pendampingan penerapan sistem budidaya terstandar tanaman kopi di kebun milik anggota Koperasi Srikandi. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada kelembagaan usaha tani di kawasan pertanian Program ICARE, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani anggota koperasi. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahapan persiapan

lahan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, hingga panen dan pascapanen, sehingga setiap tahap produksi kopi dapat dilakukan sesuai prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) sesuai Permentan nomor 49 tahun 2014 yang telah di dokumentasikan dalam Buku Pedoman Budidaya Kopi Robusta Spesifik Lampung.



Gambar 6. Pedoman Budidaya Kopi Robusta Spesifik Lampung

Dalam pelaksanaan budidaya kopi ini, BRMP Lampung mendasarkan penerapan praktik pertanian pada GAP Kopi yang terdokumentasi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2014 tentang GAP Kopi. Penerapan GAP Kopi ini mencakup berbagai aspek, antara lain penataan jarak tanam yang optimal, pemupukan yang efisien dan ramah lingkungan, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, pengelolaan kebun yang higienis, serta proses panen dan pascapanen yang menjaga kualitas biji kopi. Dengan demikian, penerapan sistem budidaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman, tetapi juga menjamin mutu hasil kopi sehingga memenuhi standar pasar domestik maupun internasional.

Melalui kegiatan ini, BRMP Lampung berupaya memastikan bahwa praktik budidaya kopi di kebun anggota Koperasi Srikandi selaras dengan prinsip-prinsip standar instrumen pertanian yang diterapkan di kawasan Program ICARE. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan model budidaya kopi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, serta memperkuat posisi kopi Tanggamus di pasar nasional maupun internasional. Kegiatan pendampingan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat rantai nilai usaha tani dan membangun kapasitas kelembagaan koperasi agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan tuntutan kualitas ekspor.



Gambar 7. Pendampingan Penerapan GAP Budidaya Kopi pada Petani Keanggotaan Koperasi Srikandi

B. Pendampingan Penerapan Pengolahan Buah Kopi Menjadi Produk Kopi

Pendampingan dimulai pada tahap budidaya kopi di kebun anggota koperasi, di mana BRMP Lampung membimbing anggota untuk menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) Kopi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2014. Tahapan budidaya yang didampingi meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta panen yang tepat waktu. Dengan penerapan standar ini, diharapkan produktivitas dan mutu biji kopi meningkat, sementara praktik pertanian tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, anggota koperasi dibekali pengetahuan tentang pencatatan kegiatan budidaya dan pemantauan kualitas, sehingga tata kelola kebun kopi dapat dilakukan secara profesional dan berbasis data.

Setelah panen, BRMP Lampung melanjutkan pendampingan pada pengolahan buah kopi menjadi *green bean*, yaitu biji kopi kering yang siap untuk diproses lebih lanjut. Pendampingan ini mencakup tahapan sortasi untuk memilih buah kopi berkualitas, fermentasi untuk mengembangkan rasa, pengeringan hingga kadar air mencapai standar mutu, serta penyimpanan yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan cita rasa kopi. Anggota koperasi juga diberikan pelatihan terkait dokumentasi kualitas dan traceability produk, sehingga setiap batch *green bean* dapat dilacak asal-usulnya dan memenuhi standar ekspor maupun konsumsi lokal.

Selain itu, BRMP Lampung melakukan pendampingan pada pengolahan *green bean* menjadi kopi bubuk siap konsumsi, sehingga koperasi dapat menghasilkan produk kopi bernilai tambah yang siap dijual ke konsumen. Tahapan pengolahan ini mencakup proses roasting, penggilingan, dan pengemasan kopi bubuk dengan tetap menjaga kualitas, aroma, dan cita rasa. Anggota koperasi dibimbing dalam mengoperasikan peralatan, menentukan tingkat sangrai yang sesuai, serta prosedur pengemasan yang higienis dan aman untuk konsumen. Dengan kemampuan ini, koperasi tidak hanya menghasilkan *green bean* sebagai bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang siap dipasarkan, meningkatkan peluang pemasaran dan pendapatan anggota.

Melalui pendampingan yang menyeluruh ini, BRMP Lampung memastikan bahwa praktik budidaya dan pengolahan kopi di Koperasi Srikandi selaras

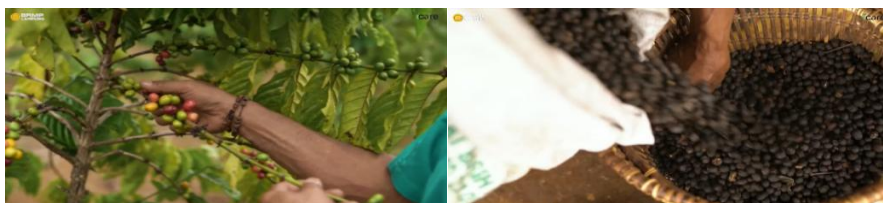
dengan standar instrumen pertanian Program ICARE. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan model pengelolaan kopi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk kopi, memperkuat posisi kopi Tanggamus di pasar nasional maupun internasional, serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Dengan demikian, Koperasi Srikandi menjadi contoh kelembagaan usaha tani yang profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan produk kopi berkualitas tinggi secara berkelanjutan.

C. Pendampingan Penerapan Pengolahan Buah Kopi Menjadi Produk Kopi

Pendampingan dimulai pada tahap budidaya kopi di kebun anggota koperasi, di mana BRMP Lampung membimbing anggota untuk menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) Kopi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2014. Tahapan budidaya yang didampingi meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, hingga panen yang tepat waktu. Dengan penerapan standar ini, produktivitas dan mutu biji kopi meningkat, sementara praktik pertanian tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Anggota koperasi juga dibekali pengetahuan mengenai pencatatan kegiatan budidaya dan monitoring kualitas sehingga tata kelola kebun kopi dapat dilakukan secara profesional dan berbasis data.

Selain pendampingan budidaya, BRMP Lampung melakukan pendampingan pengolahan buah kopi sejak proses pemetikan hingga produk akhir berupa kopi bubuk siap konsumsi. Proses ini mencakup:

- Pemetikan buah kopi secara selektif untuk memastikan hanya buah matang yang dipanen
- Sortasi dan fermentasi untuk mengembangkan rasa dan kualitas biji
- Pengeringan dan penyimpanan green bean sesuai standar mutu agar biji kopi tetap terjaga kualitasnya
- Proses roasting dan penggilingan green bean untuk menghasilkan kopi bubuk dengan cita rasa optimal
- Pengemasan kopi bubuk siap konsumsi dengan prosedur higienis untuk menjaga keamanan dan mutu produk



Gambar 8. Praktik Petik merah dan pengelolaan buah kering



Gambar 9. Proses sortasi biji kopi



Gambar 10. Proses roasting biji kopi

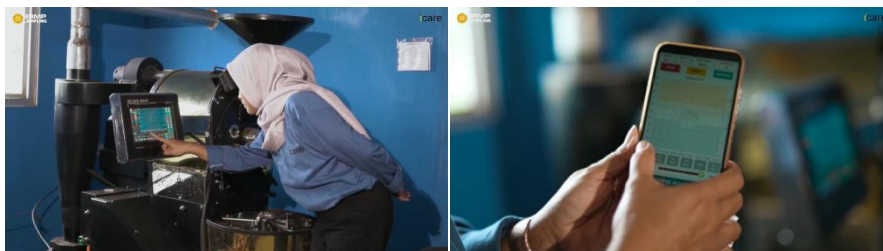
Seluruh proses pengolahan ini telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi, yang meliputi berbagai standar untuk biji kopi, kopi bubuk, dan produk kopi olahan (seperti premiks). Standar yang diterapkan antara lain:

- SNI 01-2907-2008 untuk biji kopi,
- SNI 01-3542-2004 untuk kopi bubuk,
- SNI 8964:2021 untuk kopi sangrai dan kopi bubuk.



Gambar 11. Proses pengemasan kopi

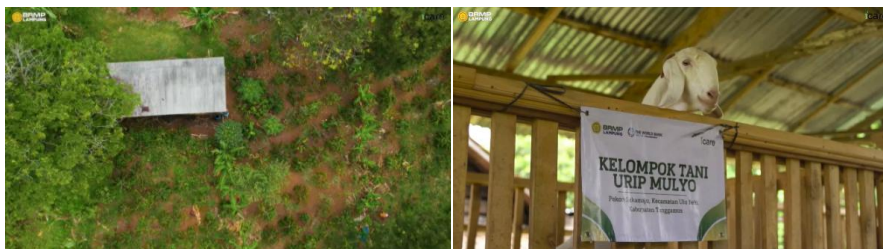
Pendampingan terkait penerapan SNI Kopi telah dimulai sejak tahun 2024 dan berlanjut hingga 2025, sehingga anggota koperasi telah memiliki pemahaman dan kemampuan teknis untuk memproduksi kopi sesuai standar nasional. Dengan penerapan standar ini, produk kopi Koperasi Srikandi tidak hanya memiliki kualitas tinggi, tetapi juga memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang diakui secara nasional, siap dipasarkan baik di tingkat domestik maupun ekspor.



Gambar 12. Penerapan Modernisasi Pengolahan Kopi di Koperasi Srikandi

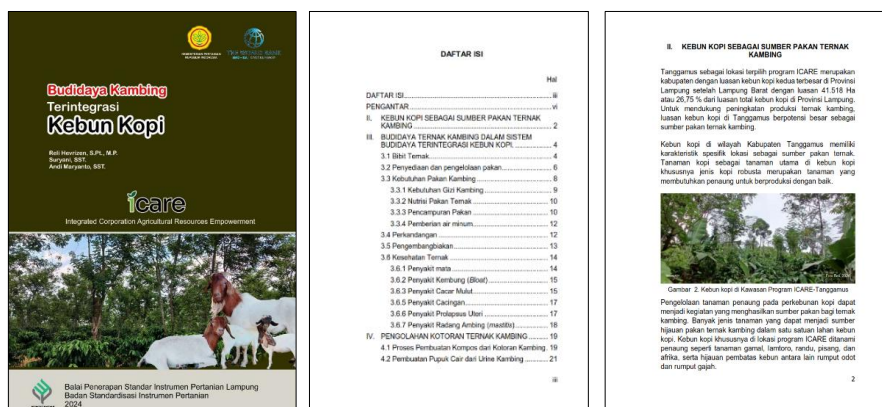
D. Pendampingan Penerapan Budidaya Ternak Kambing dan Pengelolaan Limbah Ternak Pada Keanggotaan Koperasi Srikandi

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak, efisiensi pemeliharaan, dan pemanfaatan limbah ternak secara berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas tanaman kopi melalui integrasi sistem kopi-kambing.



Gambar 13. Penerapan Sistem Budidaya Intergasi Kopi Kambing pada keanggotaan Koperasi Srikandi

Pendampingan dimulai dari perencanaan dan manajemen pemeliharaan ternak kambing, termasuk pemilihan bibit kambing yang berkualitas, penentuan jumlah ternak sesuai kapasitas kandang, serta penerapan manajemen pakan yang seimbang. BRMP Lampung membekali anggota koperasi dengan pengetahuan terkait pemberian pakan, pembesaran, manajemen kesehatan ternak, dan pengendalian penyakit, sehingga ternak tetap sehat dan produktivitas kambing meningkat. Anggota koperasi juga dilatih dalam pencatatan dan monitoring pertumbuhan ternak serta pencatatan produktivitas, sebagai bagian upaya perbaikan sistem budidaya ternak dikawasan pertanian pada program ICARE.



Gambar 14. Pedoman Budidaya Kambing Terintegrasi Kebun Kopi



Gambar 15. Pembuatan pakan ternak kambing berbahan lokal

Selanjutnya, BRMP Lampung melakukan pendampingan pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik padat dan cair, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan kebun kopi. Integrasi kopi-kambing menjadi fokus utama, di mana limbah padat dan cair kambing digunakan sebagai sumber nutrisi tambahan bagi tanaman kopi, sehingga mendukung peningkatan produktivitas dan mutu biji kopi. Sebaliknya, ternak kambing mendapatkan pakan dari hijauan penayang kopi berjenis leguminosa dan hijauan antar tanaman lain yang ditanam di sela tanaman kopi, sehingga produktivitas ternak meningkat sekaligus mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan sistem pertanian terpadu, di mana produksi kopi dan ternak saling mendukung melalui siklus pemanfaatan limbah dan sumber daya alam yang efisien.

Selain aspek teknis pemeliharaan ternak dan pemanfaatan limbah, pendampingan BRMP Lampung juga menekankan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi. Anggota koperasi dibimbing untuk mencatat produksi ternak, pengelolaan pakan, kesehatan ternak, serta pemanfaatan limbah secara sistematis. Pendekatan ini meningkatkan profesionalisme pengurus koperasi, transparansi, akuntabilitas, serta kesiapan koperasi dalam mengembangkan usaha peternakan yang berkelanjutan dan berdaya saing.



Gambar 16. Pengelolaan dan pengolahan limbah kotoran kambing

3.2.2. Sasaran 2: Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif

Sasaran tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif terdiri dari dua indikator kinerja utama: (a) Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif; (b) Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan. Pada tahun 2025 BRMP Lampung tidak memiliki target untuk indikator jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif. Pada indikator jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan BRMP Lampung telah memenuhi target yaitu 130,63 ton dengan 14,58 ton benih telah tersertifikasi, sementara 116,05 ton merupakan calon benih yang masih dalam proses sertifikasi. Capaian ini menunjukkan bahwa BRMP Lampung adalah sebesar 108,85% atau dapat dikategorikan dengan sangat berhasil.

Tidak terlepas dari hasil capaian tersebut, pada pelaksanaannya terdapat kendala yang menjadi tantangan bagi BRMP Lampung. Permasalahan utama adalah anggaran yang baru secara resmi tertuang dalam DIPA pada tanggal 30 April 2025. Penganggaran yang tidak dimulai sejak awal tahun tersebut berakibat pada sempitnya waktu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan sehingga hingga akhir tahun 2025, sehingga sebagian capaian masih tergolong dalam calon benih tersertifikasi. Meskipun demikian, proses sertifikasi benih masih terus berjalan dan dituntaskan hingga proses sertifikasi benih selesai.

Dalam lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2021, capaian produksi benih sumber tanaman pangan tahun 2025 merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2021 dan 2023, tidak terdapat produksi benih sumber oleh BRMP Lampung. Pada tahun 2022, produksi benih padi yang dihasilkan oleh BRMP Lampung adalah sebesar 9 ton. Sementara pada tahun 2024, benih padi yang dihasilkan adalah sebesar 23 ton. Jika di persentasekan, peningkatan produksi benih sumber padi pada tahun 2025 adalah sebesar 404,56% dibanding tahun sebelumnya. Grafik peningkatan produksi benih sumber padi BRMP Lampung dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 17. Grafik perkembangan produksi benih padi dalam 5 tahun terakhir

Seiring dengan perkembangan tersebut, serta dalam rangka mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, produksi benih sumber spesifik lokasi diproyeksikan akan terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2026, target produksi benih adalah sebesar 159 unit. Sementara pada tahun 2027 hingga 2029 produksi benih sumber spesifik lokasi berturut-turut adalah sebesar 13.500 unit, 14.500 unit, dan 15.000 unit. Unit yang dimaksud tidak terikat pada tonase, melainkan dapat berupa satuan unit lainnya.

Sejalan dengan capaian kinerja, tantangan pelaksanaan, serta proyeksi peningkatan produksi benih sumber spesifik lokasi tersebut, BRMP Lampung melaksanakan serangkaian kegiatan operasional perbanyakan benih sumber melalui Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) pada Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terencana dan bertahap, dimulai dari koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, penetapan lokasi dan mitra penangkar, hingga pelaksanaan teknis produksi benih di lapangan. Uraian berikut menjelaskan keberhasilan dan tahapan pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih sumber padi oleh BRMP Lampung sebagai bentuk implementasi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja dan pemenuhan kebutuhan benih bermutu di Provinsi Lampung.



Gambar 18. Koordinasi dan Sosialisasi Perbenihan Padi Ke Dinas Kabupaten

Kegiatan perbanyakan benih diawali dengan koordinasi dan konsultasi dilaksanakan sebagai penyampaian informasi kepada instansi terkait dan petani calon penangkar mengenai kegiatan UPBS BRMP Lampung tahun 2025. Koordinasi dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan dan Mesuji pada bulan Mei 2025 dan Pesawaran pada bulan Juni 2025. Hasil koordinasi masing-masing kabupaten menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan UPBS BRMP Lampung. Tim UPBS BRMP Lampung pada kesempatan tersebut menyampaikan mengenai prosedur (SOP) dan tahap pelaksanaan kegiatan UPBS. Disampaikan pula bahwa kegiatan UPBS ini didukung oleh UPTD Pengawas Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Provinsi Lampung sebagai instansi yang berwenang dalam hal sertifikasi benih. Pada akhir konsultasi dan koordinasi, disepakati untuk terus berkoordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Selain berkoordinasi dan konsultasi, tim UPBS Padi juga melakukan survey dan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) perbenihan padi di masing-masing Kabupaten. Adapun tujuan untuk memastikan apakah lahan petani masih benar tersedia atau layak tersedia air untuk penanaman perbenihan padi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan

produksi benih UPBS padi menggunakan pola mitra kerjasama dengan petani penangkar dan menggunakan lahan kebun BRMP Lampung. Adapun mekanisme mitra kerjasama dengan kesepakatan BRMP Lampung menyediakan biaya produksi berupa bahan dan upah sedangkan petani menyediakan lahan dan dalam pelaksanaannya bersedia mengikuti arahan dari BRMP Lampung. Selanjutnya petani mengembalikan biaya produksi berupa gabah kering panen.

Benih sumber yang digunakan merupakan benih satu kelas lebih tinggi dari kelas benih yang akan diproduksi. Untuk menghasilkan benih kelas SS (Stock Seed/Benih Pokok), digunakan benih sumber kelas FS (Foundation Seed/Benih Dasar). Benih sumber FS yang digunakan dalam kegiatan perbenihan di BRMP Lampung diperoleh dari BRMP Padi sebanyak 1.050 kg dengan varietas Inpari 32, Inpari 49, Cakra Buana, Inpago 13, Ciherang, dan Inpara 12, serta dari BRMP Biogen sebanyak 250 kg varietas Biosalin 1 dan Biosalin 2.



Gambar 19. Benih sumber padi pada kegiatan perbenihan padi

Distribusi benih sumber dilakukan ke lokasi perbanyakan benih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Distribusi tersebut meliputi penyaluran benih varietas Biosalin 1 dan Biosalin 2 kelas FS sebanyak 250 kg ke Kabupaten Mesuji pada 15 Mei 2025 untuk luasan 10 ha, penyaluran benih berbagai varietas ke Kabupaten Mesuji sebanyak 750 kg pada bulan Juni 2025, penyaluran benih Inpago 13 kelas FS sebanyak 250 kg ke Kabupaten Lampung Utara, serta penyaluran benih Inpago 13 sebanyak 100 kg ke Kebun Percobaan Natar, Lampung Selatan.



Gambar 20. Distribusi benih ke lokasi kegiatan pada kegiatan perbenihan padi

Pelaksanaan produksi benih sumber padi dilaksanakan melalui pola kemitraan kerja sama dengan petani penangkar serta pemanfaatan lahan kebun BRMP Lampung. Mekanisme kerja sama dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam bentuk kesepakatan bagi hasil dengan petani/penangkar, dengan proporsi yang disesuaikan kemampuan masing-masing pihak dan bersifat saling menguntungkan. Melalui pola kemitraan ini, ditetapkan target output produksi benih sumber padi BRMP Lampung Tahun 2025 sebesar 120 ton benih kelas SS. Adapun lokasi pelaksanaan produksi benih sumber padi pada Tahun 2025 meliputi empat wilayah, yaitu Kelompok Tani Karya Bakti Desa Sidang Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji; Kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di IP2MP Natar BRMP Lampung Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar dan Gapoktan Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro; Gapoktan Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran; serta Gapoktan Harapan Maju Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara.

Di Kabupaten Mesuji terealisasi seluas 7,5 ha dari target awal 10 ha. Hal ini disebabkan keterbatasan ketersediaan lahan. Pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih padi BRMP Lampung dimulai dari bulan Mei sampai dengan September 2025. Tahapan kegiatan antara lain adalah persiapan lahan, persemaian, pengelolaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen.

Tahap persiapan dan pengolahan lahan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya dengan cara dibajak menggunakan bajak roda empat. Setelah pembajakan pertama selesai, kemudian lahan direndam agar sisa tanaman dan rumput membusuk dan menjadi pupuk organik. Perendaman dilakukan selama 2-3 minggu sembari menunggu bibit padi di persemaian siap untuk dipindahkan. Pengolahan tanah dilakukan dengan pengolahan tanah sempurna, yaitu dibajak 2 kali dan garu 1 kali. Pupuk organik/pupuk kandang yang telah matang

diaplikasikan sebanyak 1 t/ha setelah pengolahan tanah pertama. Kemudian dilakukan sanitasi dengan aplikasi herbisida minimal lima hari sebelum tanam atau sesuai dengan anjuran dan kondisi setempat. Terakhir, satu hari sebelum tanam, dilakukan pengeringan lahan untuk mempermudah penanaman. Penanaman menggunakan mesin trasplanter.



Gambar 21. Penanaman menggunakan trasplanter pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Mesuji

Pemeliharaan dilaksanakan mulai pemupukan, monitoring OPT, pembinaan dan rouging. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan bersama PPL dan POPT desa Sindang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara. Hasil monitoring hama dan penyakit tidak ditemukan pada pertanaman padi. Rouging pertama dilakukan oleh Tim Perbenihan BRMP untuk memastikan tidak ada calon varietas lain sehingga terjaga kemurnian varietas yang diperbanyak.



Gambar 22. Pelaksanaan rouging dan pengendalian OPT pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Mesuji

Panen dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 menggunakan combine harvester. Gabah kering panen yang dihasilkan sebanyak 19.717 kg. selanjutnya gabah dibawa ke gudang pengeringan untuk dikeringkan dan kemudian dilakukan pemilahan antara gabah bersih dan gabah hampa/kotor menggunakan mesin pengipas gabah. Calon benih kemudian disimpan di

gudang penyimpanan UPBS BRMP Lampung untuk selanjutnya pada Minggu ke-3 Oktober 2025 dilaksanakan uji lab benih. Hasil uji menyatakan bahwa sebanyak 7.500 kg benih padi varietas Biosalin 1 dan 7.080 kg Biosalin 2 dinyatakan lulus sebagai benih sumber kelas SS yang tersertifikasi.

Kegiatan perbanyak benih di Kabupaten Pesawaran mulai bulan Juni 2025. Kegiatan perbanyak benih padi dimulai dari persiapan lahan, persemaian, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Persiapan dan pengolahan lahan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya dengan cara di bajak menggunakan bajak roda empat. Selesai bajak pertama lahan direndam agar sisa tanaman dan rumput membusuk dan menjadi pupuk organik. Perendaman dilakukan selama 2-3 minggu sambil menunggu bibit padi dipersemaian siap untuk dipindahkan. Pengolahan tanah dilakukan dengan pengolahan tanah sempurna di bajak 2 kali dan garu 1 kali. Aplikasi pupuk organik/pupuk kandang yang telah matang sebanyak 1 t/ha setelah pengolahan tanah pertama. Melakukan sanitasi dengan aplikasi herbisida minimal lima hari sebelum tanam atau sesuai dengan anjuran dan kondisi setempat. Satu hari sebelum tanam, dilakukan pengeringan lahan untuk mempermudah penanaman. Penanaman menggunakan mesin trasplanter dan pindah tanam biasa.



Gambar 23. Pendampingan penanaman secara pindah tanam biasa pada Kegiatan perbanyak benih padi di Kabupaten Pesawaran

Pemeliharaan dilaksanakan mulai pemupukan, monitoring OPT, pembinaan dan rouging. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan bersama PPL dan POPT Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin. Hasil monitoring hama dan penyakit tidak ditemukan pada pertanaman padi. Rouging pertama

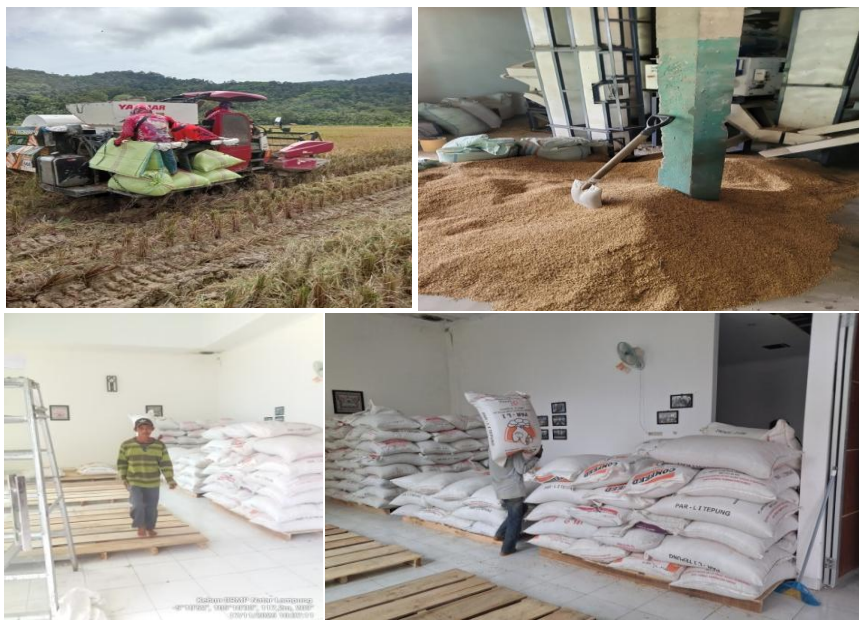
dilakukan oleh Tim Perbenihan BRMP untuk memastikan tidak ada calon varietas lain sehingga terjaga kemurnian varietas yang diperbanyak.



Gambar 24. Pelaksanaan rouging dan pengendalian OPT pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Pesawaran

Panen dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2025 menggunakan combine harvester. Gabah kering panen yang dihasilkan sebanyak 81.230 kg. Hasil panen ini lebih tinggi dibandingkan taksasi yang diperkirakan oleh BPSB saat pemeriksaan la pang ke 3 yang mana perkiraan panen adalah sebesar 75.450 kg untuk seluruh lokasi tanam di pesawaran. Selanjutnya gabah dibawa ke gudang pengeringan untuk dikeringkan dan kemudian dilakukan pemilahan antara gabah bersih dan gabah hampa/kotor menggunakan mesin pengipas gabah. Calon benih kemudian disimpan di gudang penyimpanan UPBS BRMP Lampung. Selanjutnya pada Minggu ke-2 Januari 2026 dilaksanakan uji lab benih.

Kegiatan perbanyak benih di Kabupaten Pesawaran mulai bulan Juni 2025 dimana tahap perbanyak benih padi dimulai dari persiapan lahan, persemaian, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Persiapan dan pengolahan lahan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya dengan cara di bajak menggunakan bajak roda 4. Selesai bajak pertama lahan direndam agar sisa tanaman dan rumput membusuk dan menjadi pupuk organik. Perendaman dilakukan selama 2-3 minggu sambil menunggu bibit padi dipersemaian siap untuk dipindahkan. Pengolahan tanah dilakukan dengan pengolahan tanah sempurna di bajak 2 kali dan garu 1 kali. Aplikasi pupuk organik/pupuk kandang yang telah matang sebanyak 1 t/ha setelah pengolahan tanah pertama. Melakukan sanitasi dengan aplikasi herbisida minimal lima hari sebelum tanam atau sesuai dengan anjuran dan kondisi setempat. Satu hari sebelum tanam, dilakukan pengeringan lahan untuk mempermudah penanaman. Penanaman menggunakan mesin trasplanter dan pindah tanam biasa.



Gambar 25. Pelaksanaan panen menggunakan combine hasvester dan penyimpanan benih pada Kegiatan perbanyakan benih padi di Kabupaten Pesawaran



Gambar 26. Pendampingan Pembuatan persemaian, aplikasi kapur dan pengolahan tanah pada Kegiatan perbanyakan benih padi di Kabupaten Lampung Utara

Pemeliharaan dilaksanakan mulai dari pemupukan, monitoring OPT, pembinaan dan rouging. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan bersama PPL

dan POPT Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar. Hasil monitoring hama dan penyakit tidak ditemukan pada pertanaman padi. Rouging pertama dilakukan oleh Tim Perbenihan BRMP untuk memastikan tidak ada calon varietas lain sehingga terjaga kemurnian varietas yang diperbanyak.



Gambar 27. Pelaksanaan rouging dan pengendalian OPT pada kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Lampung Utara

Panen dilaksanakan pada bulan Januari 2026 menggunakan combine harvester. Gabah kering panen yang dihasilkan sebanyak 50.200 kg. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan nilai taksasi BPSB pada PL 3 yang mana nilai taksasi itu adalah sebesar 40.600 kg untuk seluruh lokasi tanam di Lampung utara. selanjutnya gabah dibawa ke gudang pengeringan untuk dikeringkan dan dilakukan pemilahan antara gabah bersih dan gabah hampa/kotor menggunakan mesin pengipas gabah. Calon benih kemudian disimpan di gudang penyimpanan UPBS BRMP Lampung. Selanjutnya pada Minggu ke-2 Februari 2026 dilaksanakan uji lab benih.



Gambar 28. Pelaksanaan panen menggunakan *combine harvester* pada Kegiatan perbanyakan benih padi di Kabupaten Lampung Utara

Kegiatan perbanyakan benih di IP2MP Natar BRMP Lampung mulai bulan September 2025. Tahap perbanyakan benih padi dimulai dari persiapan

lahan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Persiapan dan pengolahan lahan dilaksanakan pada bulan September 2025. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya dengan cara di bajak menggunakan bajak roda 4. Selesai bajak pertama lahan dibiarkan agar sisa tanaman dan rumput membusuk dan menjadi pupuk organik. Pengolahan tanah dilakukan dengan pengolahan tanah sempurna di bajak 2 kali dan garu 1 kali. Aplikasi pupuk organik/pupuk kandang yang telah matang sebanyak 1 t/ha setelah pengolahan tanah pertama. Melakukan sanitasi dengan aplikasi herbisida minimal lima hari sebelum tanam atau sesuai dengan anjuran dan kondisi setempat. Penanaman menggunakan mesin tabela sederhana.



Gambar 29. Pendampingan pengolahan lahan dan penanaman secara tabela pada Kegiatan perbanyakan benih padi di IP2MP Natar BRMP Lampung

Pemeliharaan dilaksanakan mulai pemupukan, monitoring OPT, pembinaan dan rouging. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan Tim perbenihan BRMP Lampung. Hasil monitoring hama dan penyakit tidak ditemukan pada pertanaman padi. Rouging dilakukan oleh Tim Perbenihan BRMP untuk memastikan tidak ada calon varietas lain sehingga terjaga kemurnian varietas yang diperbanyak.

Panen dilaksanakan pada bulan Januari 2026 menggunakan combine harvester. Gabah kering panen yang dihasilkan sebanyak 6.000 kg varietas Inpago 13. Selanjutnya, gabah dibawa ke gudang pengeringan untuk dikeringkan, kemudian dilakukan pemilahan antara gabah bersih dan gabah hampa/kotor menggunakan mesin pengipas gabah. Hasil pemeriksaan lapang tahap III (PL 3) yang dilakukan oleh BPSB menyatakan bahwa seluruh lahan tanam yang ada di IP2MP Natar tidak lulus PL 3 karena nilai CVL yang terlalu tinggi, sehingga hasil panen calon benih tidak dapat dilanjutkan ke proses sertifikasi benih. Saat ini, benih disimpan di gudang penyimpanan UPBS BRMP Lampung.



Gambar 30. Pelaksanaan panen menggunakan *combine hasvester* pada Kegiatan perbanyakan benih padi di IP2MP Natar

BRMP Lampung selaku pelaksana UPBS UPT Kementerian Pertanian melaksanakan pembinaan dilokasi kegiatan perbanyakan benih padi. Kegiatan pembinaan ini bertujuan agar petani penangkar dapat melaksanakan proses perbanyakan benih padi dengan baik sehingga menghasilkan benih yang berkualitas dan bermutu. Pembinaan kepada petani penangkar berupa budidaya perbanyakan benih padi agar petani penangkar memahami tahapan perbanyakan benih dengan baik.



Gambar 31. Pembinaan produksi benih pada kegiatan perbenihan padi

Pembinaan penangkar diutamakan pada kegiatan berupa pemahaman tentang pelaksanaan rouging tanaman padi dan pengendalian OPT. Rouging merupakan tahapan yang paling penting untuk memastikan kemurnian varietas yang diperbanyak. Pelaksanaan rouging bertujuan untuk membuang calon varetas lain sehingga sebuah varietas tidak tercampur dengan varietas lainnya. Selain kegiatan rouging pentingnya pengendalian OPT agar kesehatan tanaman padi terjaga. Dengan demikian, pertumbuhan tanaman padi bisa maksimal sehingga dapat meningkatkan produksi benih.



Gambar 32. Pembinaan kegiatan perbenihan padi di Kabupaten Mesuji



Gambar 33. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan pada kegiatan perbenihan padi di Kab. Lampung Utara

Berkaitan dengan stok benih saat ini benih yang sudah tersedia dan dapat didistribusikan oleh BRMP Lampung dari hasil kegiatan perbenihan 2025 per Desember 2025 adalah sebanyak 14. 580 kg yang terdiri dari varietas Biosalin 1 sebanyak 7.080 kg dan Biosalin 2 sebanyak 7.500 kg.



Gambar 34. Stok benih Biosalin 1 dan Biosalin 2 di gudang UPBS BRMP Lampung

3.2.3. Sasaran 3: Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani

Sasaran terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani terdiri dari satu indikator kinerja berupa jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern. Namun, pada tahun 2025 BRMP Lampung tidak memiliki target yang harus dipenuhi.

3.2.4. Sasaran 4: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima terdiri dari satu indikator kinerja berupa nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung. Pada tahun 2025 BRMP Lampung ditargetkan memperoleh nilai 82,11.

Realisasinya, BRMP Lampung memperoleh nilai Zona Integritas (ZI) sebesar 84,49 atau tercapai sebesar 102,9% (sangat berhasil). Nilai tersebut secara resmi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan penilaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 10 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.

Hasil penilaian mandiri merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada enam area perubahan pada komponen Pengungkit. Enam area tersebut adalah (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tatalaksana; (3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (5) Penguatan Pengawasan; dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap komponen Hasil. Rincian penilaian Zona Integritas (ZI) BRMP Lampung tahun 2025 disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas BRMP Lampung Tahun 2025

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT		60,00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,28	3,42	6,70	83,75%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,54	1,84	4,38	62,52%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	3,37	3,58	6,95	69,52%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	5,00	4,00	9,00	89,95%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,06	7,50	13,56	90,40%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,32	2,93	6,25	62,47%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					46,83	78,05%	OK

B. HASIL		40,00					
I.	BIROKRASI YANG	22,50			20,81	92,50%	OK
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			17,06	97,50%	OK
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75	75,00%	OK
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			16,84	96,25%	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			16,84	96,25%	OK
TOTAL HASIL					37,66	94,14%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					84,49		OK

Secara keseluruhan, nilai pada tiap-tiap area baik komponen pengungkit maupun hasil telah melebihi ambang batas nilai yang dipersyaratkan pada Permen PANRB nomor 90 tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, syarat untuk menuju predikat WBK adalah apabila total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40. Kemudian nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit. Berdasarkan data pada tabel 6, total nilai pengungkit adalah 46,83 dengan total nilai pengungkit dan hasil adalah 84,49 dengan nilai pada seluruh area pengungkit di atas 60%. Dengan demikian, BRMP Lampung telah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK.

Capaian nilai pembangunan Zona Integritas BRMP Lampung Tahun 2025 tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses perbaikan dan penguatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk melihat konsistensi dan dinamika pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, diperlukan analisis perkembangan nilai dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, uraian berikut menyajikan capaian nilai pembangunan Zona Integritas BRMP Lampung selama lima tahun terakhir sebagai dasar evaluasi keberlanjutan kinerja, identifikasi tantangan, serta perumusan langkah strategis peningkatan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan tabel di atas perolehan nilai pembangunan ZI BRMP Lampung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Namun, dari keseluruhan capaian tersebut, nilai tertinggi dicapai pada tahun 2025 dengan peningkatan sebesar 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2025 seluruh area komponen telah memenuhi syarat (lulus) sehingga dalam lima tahun terakhir, predikat WBK dapat tercapai pada

tahun 2025. Perbandingan nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) selama 5 tahun terakhir

Tahun		2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Total		82,64	81,16	83,17	82,11	84,49
Komponen Pengungkit	Nilai	75,11	78,41	84,42	80,28	78,05
	Jumlah area tidak lulus	1	1	1	1	-
Komponen Hasil	Nilai	93,95	85,27	81,30	84,48	94,14
	Jumlah area tidak lulus	-	1	1	1	-

Tidak terlepas dari capaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan dan hambatan dalam mencapai nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM tahun 2025. Sebelum mencapai nilai terakhir, sebelumnya BRMP Lampung memperoleh nilai sebesar 82,56. Pada dasarnya angka tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK). Namun, terdapat satu area yang nilainya tidak memenuhi nilai minimal, yaitu pada area peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan teknis dan *human error* pada saat pengumpulan eviden. Setelah adanya perbaikan dan pelengkapan eviden, area tersebut lulus dengan nilai 62,47 sehingga predikat WBK dapat diraih. Meskipun demikian, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian nilai pada area-area yang masih kurang maksimal seperti pada area penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan antara lain adalah penertiban dan peningkatan kesadaran pentingnya implementasi Zona Integritas, pelaporan capaian pada tiap-tiap indikator minimal triwulanan, serta mengimplementasikan butir-butir pembangunan Zona Integritas secara kontinu pada kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja. Selain itu, perlu adanya inovasi-inovasi dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas seperti dengan monitoring dan evaluasi capaian pembangunan Zona Integritas secara berkala, digitalisasi sistem terutama yang melibatkan proses bisnis di satuan kerja BRMP Lampung, serta keterbukaan saran dan masukan dari berbagai sumber dalam rangka perbaikan sistem. Melalui langkah strategis tersebut diharapkan capaian nilai pembangunan Zona Integritas di lingkup BRMP Lampung dapat terus meningkat. Dalam lima

tahun mendatang, capaian nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM diproyeksikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Target nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam lima tahun mendatang yaitu: 84,49 pada tahun 2026; 84,75 pada tahun 2027; 84,85 pada tahun 2028; dan 85,00 pada tahun 2029.

3.2.5. Sasaran 5: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung. Penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Hasil IKPA ditampilkan melalui laman resmi Kementerian Keuangan pada aplikasi emonev Bappenas <https://monev.kemenkeu.go.id/>.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Lampung tahun 2025 mencapai 93,58. Persentase capaian IKPA adalah sebesar 103,10% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BRMP Lampung, yaitu nilai 91. Dengan demikian, capaian nilai IKPA BRMP Lampung tahun 2025 dikategorikan "sangat berhasil". Terdapat tiga aspek penilaian IKPA, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Uraian nilai pada masing-masing aspek disajikan dalam tabel 8.

Tabel 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	100	79,82	97,42	80	94,12	99,54	100	
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Akhir	10	11,97	19,48	8	9,41	9,95	25	
Nilai Aspek	89.91		92.77				100.00	93,82

A. Kualitas Perencanaan Anggaran

Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas Perencanaan

anggaran terdiri dari dua indikator penilaian, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester. Indikator revisi DIPA memiliki bobot 10% dari keseluruhan nilai IKPA. Nilai Kinerja Revisi DIPA BRMP Lampung tahun 2025 adalah 100. Indikator deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja yang telah dimutakhirkan. Indikator Deviasi halaman III DIPA memiliki bobot 15% dari keseluruhan nilai IKPA. Nilai Kinerja Deviasi Halaman III DIPA adalah 79,82.

B. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pengukuran penilaian aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari empat indikator, yaitu: penyerapan anggaran; belanja kontraktual; penyelesaian tagihan; dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada masing-masing jenis belanja. Nilai indikator penyerapan anggaran BRMP Lampung tahun 2025 adalah 97,42. Sementara serapan anggaran BRMP Lampung tahun 2025 secara real berdasarkan SP2D adalah 97,66%.

Indikator belanja kontraktual dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu: rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaannya telah selesai sebelum DIPA berlaku efektif terhadap kontrak yang ditandatangani sampai triwulan I tahun berjalan; rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian kontrak yang dibayarkan sekaligus untuk pengadaan belanja modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak belanja modal; dan rasio kontrak yang ditandatangani hingga triwulan II terhadap seluruh kontrak. Nilai indikator belanja kontraktual BRMP Lampung tahun 2025 adalah 80.

Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Nilai indikator penyelesaian tagihan BRMP Lampung tahun 2025 adalah 94,12. Selama 12 bulan, terdapat satu tagihan yang penyelesaiannya tidak tepat waktu sehingga menjadi pengurang nilai pada indikator tersebut.

Indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari dua komponen, yaitu pengelolaan UP – TUP tunai dan pengelolaan UP kartu kredit pemerintah (KKP). Pengelolaan UP – TUP tunai dinilai berdasarkan tugas sub komponen, yaitu: ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban; rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai; dan nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun. Pada akhir tahun anggaran, nilai ketepatan waktu juga memperhitungkan sisa UP tunai dan TUP tunai yang belum disetor ke rekening Kas Umum Negara sebagai pengurang nilai. Pengelolaan UP KKP dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja pengelolaan UP KKP tiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio transaksi UP KKP terhadap target transaksi UP KKP. Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP adalah 99,54. Pada dasarnya secara keseluruhan pertanggungjawaban UP, TUP serta KKP di BRMP Lampung tahun 2025 telah dilaksanakan secara tepat waktu. Namun pada akhir tahun terdapat kendala pada penyelesaian TUP terakhir sehingga menjadi pengurang nilai sebesar 0,46%.

C. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

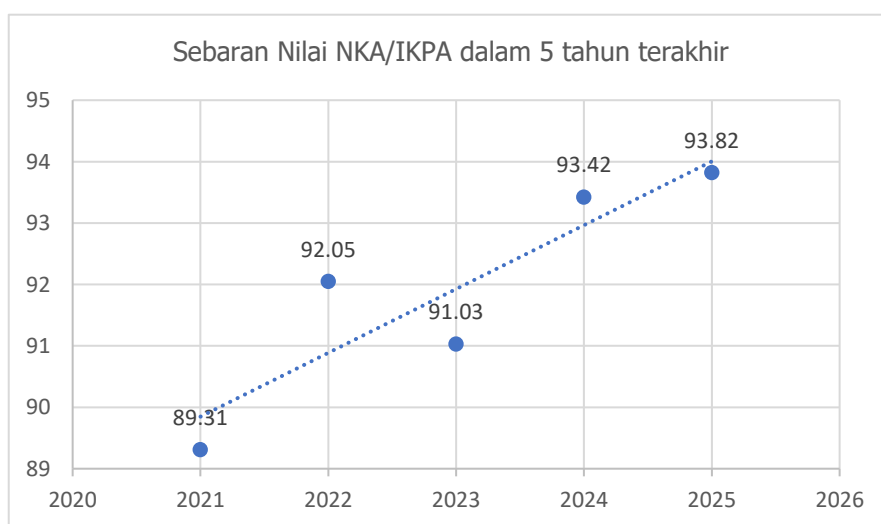
Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA, yaitu berupa capaian output. Indikator capaian output dihitung berdasarkan nilai dari dua komponen, yaitu nilai ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai capaian realisasi Rincian Output (RO). Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara realisasi RO terhadap target realisasi RO. Data capaian output terdiri dari Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan Progress Capaian Rincian Output (PCRO). Nilai indikator capaian output BRMP Lampung tahun 2025 adalah 100.

Dalam lima tahun terakhir, capaian nilai tahun 2025 merupakan yang tertinggi. Sebagai catatan bahwa nilai yang diambil pada tahun 2021 hingga 2023 merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang didapatkan dari situs resmi Kementerian Keuangan <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Angka tersebut diambil berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan. Selain itu, pada ketiga periode tahun tersebut belum ditetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sehingga dalam hal ini penilaian NKA pada tahun 2021 hingga 2023 diasumsikan setara dengan penilaian IKPA tahun 2024 hingga 2025 sebagai bahan perbandingan capaian kinerja selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, tren nilai yang diperoleh BRMP Lampung mengalami peningkatan. Hanya saja terdapat penurunan nilai pada tahun 2023. Pada tahun 2025 capaian nilai IKPA mengalami peningkatan sebesar 0,43% dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya. Perbandingan dan sebaran capaian nilai NKA/IKPA

dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel 9 dan grafik pada gambar 35.

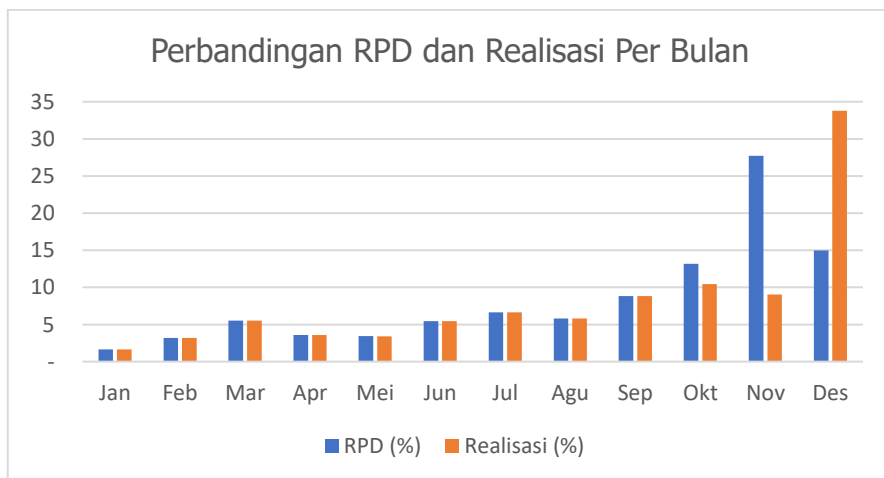
Tabel 9 Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kualitas Perencanaan Anggaran				88,39	89,91
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				91,93	92,77
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				100	100
4	Nilai Total	89,31	92,05	91,03	93,42	93,82

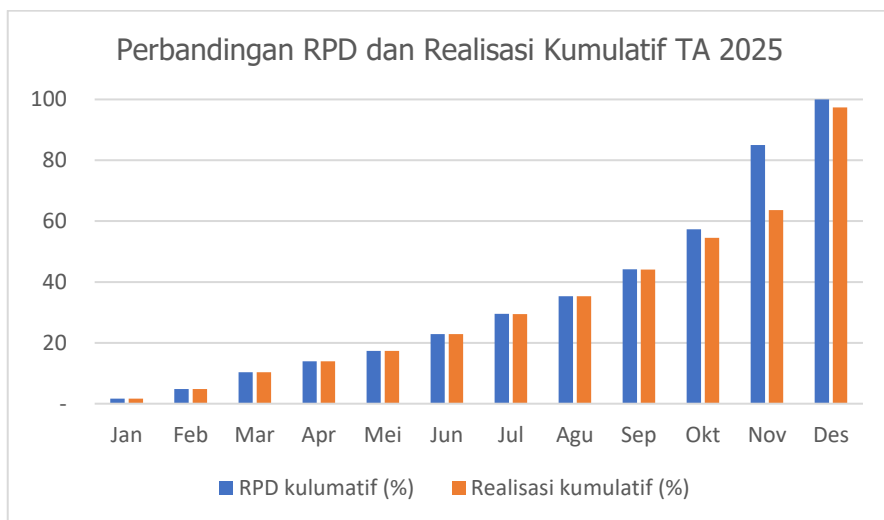


Gambar 35 Sebaran nilai NKA/IKPA dalam 5 tahun terakhir

Seiring dengan capaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BRMP Lampung yang menjadi tantangan dalam mencapai target nilai IKPA yang telah ditentukan di dalam PK. Indikator dengan nilai terendah adalah pada indikator deviasi halaman III DIPA dengan nilai 79,82. Gap antara angka RPD dengan realisasi paling tinggi terjadi pada bulan November dan Desember. Hal ini terjadi akibat dari dinamika kebijakan yang menyebabkan berbagai anggaran terblokir dan baru dapat direalisasikan pada akhir tahun. Grafik perbandingan antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi dapat dilihat pada gambar 36 dan gambar 37.



Gambar 36. Grafik perbandingan RPD dan realisasi per bulan



Gambar 37. Grafik perbandingan RPD dan realisasi kumulatif TA 2025

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2025, BRMP Lampung melaksanakan kinerja lainnya yang tidak tercantum di dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut antara lain adalah berikut ini.

3.3.1. Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Sebagai bagian dari struktur pelaksana teknis Kementerian Pertanian di daerah, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung memiliki

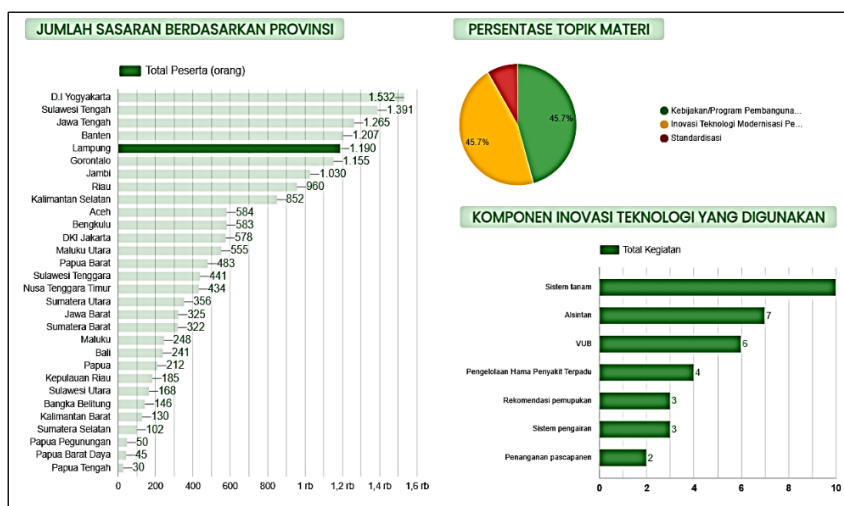
mandat untuk mendampingi pelaksanaan program strategis pertanian di wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan pendampingan ini difokuskan pada upaya peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas padi, melalui program Optimalisasi Lahan (OPLAH), penambahan luas tanam (LTT) reguler, pengembangan padi gogo, serta penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan dan pendampingan Brigade Pangan (BP).

a. Koordinasi dan Sosialisasi

BRMP Lampung secara aktif berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara dinas pertanian kabupaten/kota dengan UPT vertikal Kementerian Pertanian dan mitra pelaksana. Kegiatan sosialisasi program strategis telah dilakukan melalui berbagai pertemuan koordinasi lintas kabupaten dan lintas stake holder membahas dan mengevaluasi capaian program swasembada pangan secara kolaboratif.

b. Pendampingan Diseminasi Teknologi Pertanian Mendukung Program Swasembada Pangan

Pendampingan swasembada pangan merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penguatan kapasitas pelaku utama serta penerapan inovasi teknologi. Dalam rangka melihat capaian pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan, diperlukan gambaran awal berbasis data hasil monitoring dan evaluasi. Grafik berikut menyajikan ringkasan informasi terkait pelaksanaan pendampingan swasembada pangan oleh BRMP Lampung, meliputi jumlah sasaran pendampingan, topik materi yang disampaikan, serta komponen inovasi teknologi yang digunakan. Data yang ditampilkan merupakan data sampling hasil monitoring dan evaluasi hingga bulan Agustus 2025, yang digunakan untuk memberikan gambaran umum capaian pendampingan yang telah dilaksanakan.



Gambar 38. Capaian Sasaran Pendampingan Swasembada Pangan

Berdasarkan grafik jumlah sasaran pendampingan swasembada pangan per provinsi, Provinsi Lampung mencatat jumlah sasaran sebanyak 1.190 peserta, yang menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan capaian pendampingan tertinggi secara nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, capaian Lampung berada pada kelompok atas dan sejajar dengan provinsi-provinsi prioritas seperti Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, serta lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lampung menjadi wilayah penting dalam pelaksanaan pendampingan swasembada pangan.

Dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia lainnya, jumlah sasaran di Lampung relatif lebih besar daripada Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi di wilayah Papua dan kepulauan. Hal ini memberikan gambaran bahwa intensitas pendampingan yang dilakukan oleh BRMP Lampung cukup menonjol jika dibandingkan dengan banyak provinsi lainnya pada periode pengamatan.

Selanjutnya, grafik persentase topik materi dan komponen inovasi teknologi yang ditampilkan merupakan data khusus Provinsi Lampung. Pada Lampung, materi pendampingan didominasi oleh topik Kebijakan/Program Pembangunan Pertanian dan Inovasi Teknologi Modernisasi Pertanian dengan proporsi yang seimbang. Jika dikaitkan dengan posisi Lampung sebagai provinsi dengan jumlah sasaran besar, komposisi materi ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya difokuskan pada penerapan teknis di lapangan, tetapi juga pada penguatan pemahaman kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program swasembada pangan.

Dari sisi inovasi teknologi, pendampingan di Lampung lebih banyak menerapkan sistem tanam, alsintan, dan varietas unggul baru, yang mencerminkan fokus pada peningkatan produktivitas di tahap budidaya. Pola ini sejalan dengan kecenderungan umum di provinsi-provinsi dengan sasaran pendampingan besar, yang umumnya menitikberatkan inovasi pada aspek hulu produksi. Namun demikian, penerapan inovasi penanganan pascapanen dan standardisasi di Lampung masih relatif terbatas, sebagaimana juga terjadi di banyak provinsi lain, sehingga aspek ini belum menjadi fokus utama pendampingan secara nasional.

Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Lampung menunjukkan capaian pendampingan yang relatif tinggi dari sisi jumlah sasaran, dengan fokus materi dan inovasi yang sejalan dengan pola umum pendampingan swasembada pangan. Data yang disajikan merupakan data sampling hasil monitoring dan evaluasi hingga bulan Agustus 2025, sehingga belum mencerminkan keseluruhan kegiatan pendampingan tahun 2025. Meskipun demikian, data ini telah memberikan gambaran umum mengenai posisi dan capaian pendampingan yang dilakukan oleh BRMP Lampung dalam konteks pelaksanaan pendampingan swasembada pangan secara nasional.



Gambar 39. Jumlah Sasaran Pendampingan Program Strategis Kementan Berdasarkan Profesi

Lebih lanjut berkaitan dengan rangkaian pendampingan juga melibatkan berbagai profesi yang memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan program, mulai dari petani dan penyuluh, hingga aparat lapangan dan staf dinas, serta tenaga pendukung teknis. Berdasarkan laporan melalui *looker studio* Pendampingan Swasembada pangan dengan update per Agustus 2025, bahwa pendampingan yang dilakukan BRMP Lampung telah menjangkau 554 petani, yang secara langsung mendapatkan pelatihan mengenai budidaya padi reguler dan padi gogo, pengelolaan hama terpadu, pemupukan efisien, serta praktik optimalisasi lahan untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai ujung tombak transfer teknologi pertanian, 305 penyuluh pertanian turut menerima pelatihan intensif agar mampu mendukung petani dalam penerapan praktik terbaik, strategi LTT, dan pengelolaan padi gogo. Selain itu, 22 petugas pengendali organisme pengganggu tanaman diberikan pendampingan khusus mengenai pengendalian hama dan penyakit padi secara bijak, termasuk pemanfaatan metode hayati dan penggunaan pestisida yang aman. Pengawas benih tanaman sejumlah 12 orang juga mendapatkan pendampingan yang difokuskan pada kualitas benih, verifikasi varietas unggul, dan pemilihan benih sehat untuk mendukung LTT padi reguler maupun padi gogo.

Tidak kalah penting, 28 Babinsa dilibatkan untuk mendukung koordinasi kegiatan di lapangan, menjaga keamanan dan ketertiban program, serta memastikan praktik budidaya padi berjalan sesuai standar. Staf dinas sebanyak 118 orang berperan dalam perencanaan, koordinasi, serta monitoring capaian LTT dan optimasi lahan padi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, 118 tenaga dari profesi lainnya, termasuk akademisi, anggota kelompok tani, dan pendukung teknis, berperan dalam administrasi, dokumentasi, dan pengolahan data produksi padi. Keterlibatan lintas profesi ini memungkinkan terciptanya integrasi yang baik antara praktik lapangan dan kebijakan, sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan target swasembada padi dapat diawasi dengan optimal.

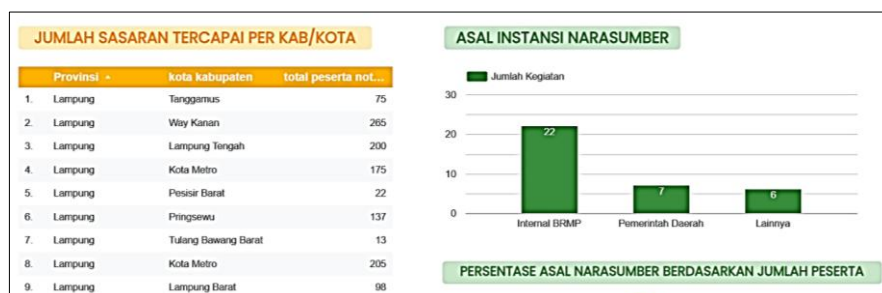
Dari capaian yang terlihat, program pendampingan ini telah menunjukkan hasil yang positif, terutama pada peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, yang merupakan ujung tombak pencapaian target produksi padi. Namun, masih terdapat peluang untuk memperkuat kontribusi profesi pendukung seperti petugas POPT, pengawas benih, Babinsa, dan staf dinas agar pendampingan lebih maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan intensitas pelatihan dan kegiatan lapangan, penguatan koordinasi lintas profesi melalui forum rutin, serta monitoring dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi. Selain itu, pemberdayaan profesi lain yang mendukung administrasi dan pengolahan data produksi padi harus dilakukan lebih awal agar proses perencanaan dan pelaksanaan program menjadi lebih efisien. Dengan penerapan strategi tersebut, pendampingan BRMP Lampung diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga capaian optimasi lahan, LTT reguler, dan pengembangan padi gogo dapat meningkat secara signifikan, mendukung tercapainya swasembada pangan di Lampung secara keseluruhan.

Pada aspek sasaran sumber daya manusia dan pelibatan narasumber BRMP Lampung juga telah melaksanakan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian dengan fokus untuk mensukseskan capaian optimasi lahan, Luas Tambah Tanam (LTT), Brigade Pangan, dan luasan tanam padi gogo, hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam pelaksanaan pendampingan, sasaran pendampingan per Agustus 2025 BRMP Lampung tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Tanggamus 75 orang, Waykanan 265 orang, Lampung Tengah 200 orang, Kota Metro 380 orang (termasuk dua data gabungan 175 + 205 orang), Pesisir Barat 22 orang, Pringsewu 137 orang, Tulang Bawang Barat 13 orang, dan Lampung Barat (jumlah belum tercatat). Pendampingan ini melibatkan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi teknis dan pengalaman lapangan, dengan total 35 kegiatan. Dari jumlah kegiatan tersebut, 22 kegiatan melibatkan narasumber dari BRMP Lampung, 7 kegiatan melibatkan narasumber dari pemerintah daerah, dan 6 kegiatan melibatkan narasumber pihak lainnya, sehingga tercipta kombinasi pengetahuan lokal dan keahlian teknis yang mendukung keberhasilan program.

Evaluasi pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa BRMP Lampung telah berhasil menjangkau sasaran utama di lapangan dengan baik. Melalui kegiatan ini, petani, penyuluh, aparat lapangan, dan staf dinas mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik optimalisasi lahan, strategi LTT padi, pengembangan padi gogo, serta peran Brigade Pangan dalam mendukung swasembada. Keterlibatan narasumber dari berbagai instansi memperkaya kualitas materi pendampingan dan memberikan perspektif praktis yang sesuai dengan kondisi lokal. Meski demikian, evaluasi juga menemukan bahwa distribusi sasaran di beberapa

kabupaten masih bervariasi dan belum merata, sehingga potensi peningkatan partisipasi dan pemanfaatan teknologi pertanian di wilayah tertentu masih bisa ditingkatkan.



Gambar 40. Capaian Jumlah sasaran pendampingan Per Evaluasi Agustus 2025 dan Keragaan Asal Instansi Narasumber

Berdasarkan capaian dan evaluasi tersebut, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan antara lain : BRMP Lampung perlu mempertahankan dan meningkatkan intensitas pendampingan di daerah yang masih memiliki jumlah sasaran relatif kecil dan atau yang belum sama sekali dilakukan pendampingan agar capaian program lebih merata. Selain itu, perlu memperkuat koordinasi lintas narasumber, termasuk pemerintah daerah dan pihak lain, untuk memastikan transfer pengetahuan yang lebih efektif dan massif berkaitan dengan percepatan tanam dan teknologi pendukung lainnya yang relevan untuk dan implementasi optimasi lahan, luas tambah tanam, dan perluasan padi gogo. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data juga penting untuk memantau capaian LTT, optimasi lahan, dan luas tanam padi gogo secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemberdayaan aparat lokal dan Brigade Pangan sebaiknya lebih intensif agar peran mereka dalam pengawalan program strategis kementerian dapat lebih optimal, serta inovasi praktik pertanian yang tepat dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten/kota sasaran.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan pendampingan yang dilakukan oleh BRMP Lampung akan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, sehingga target optimasi lahan, LTT, Brigade Pangan, dan luasan tanam padi gogo dapat tercapai secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

c. Fasilitasi BRMP Lampung pada Pendampingan Program

Fasilitasi lapang yang dilaksanakan oleh BRMP Lampung merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung implementasi Program Swasembada Pangan Tahun 2025 di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendampingan langsung di tingkat kabupaten/kota dengan tujuan memastikan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian berjalan sesuai sasaran, kebutuhan wilayah, dan kondisi lapangan.

Dalam pelaksanaannya, fasilitasi lapang mencakup berbagai bentuk pendampingan, antara lain diseminasi benih unggul dan adaptif, pendampingan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, fasilitasi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta pengawalan administrasi dan usulan program strategis. Rekapitulasi pelaksanaan fasilitasi lapang BRMP Lampung pada Program Swasembada Pangan Tahun 2025 di 12 kabupaten/kota disajikan pada Tabel 10, yang sekaligus menggambarkan capaian atau output kegiatan yang telah dihasilkan.

Tabel 10. Rekapitulasi fasilitasi lapang BRMP pada Program Swasembada Pangan tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Fasilitasi Lapang	Output Kegiatan
1	Mesuji	1. Diseminasi benih inpari-32 ke lokasi bencana banjir di Kecamatan Rawajitu Utara, dan Mesuji, dalam rangka penanganan banjir. 2. Diseminasi varietas biosalin untuk lokasi rawa pasang surut untuk Kecamatan Rawa Jitu Utara dan Mesuji	1. Benih telah didiseminasikan di lokasi sawah yang dilanda banjir 2. Benih telah didiseminasikan rawa pasang surut untuk Kecamatan Rawa Jitu Utara dan Mesuji
2	Lampung Barat	1. Pendampingan cetak/rehabilitasi sawah bersama BUMD. 2. Pendampingan penerapan percontohan pertanian modern bersama BUMD. 3. Pendampingan usulan alsintan dan perbaikan irigasi. 4. Pendampingan sinkronisasi data panen 5. Pendampingan pengawaln usulan irigasi melalui aplikasi SIPURI	1. Cetak/rehabilitasi sawah di Kecamatan Sukau sekitar 20 ha telah diajukan melalui pendanaan APBD. 2. Fasilitasi jejaring kerjasama antara BUMD dengan penyedia jasa penanaman transplanter dalam penerapan percontohan pertanian modern. 3. Koordinasi pengusulan alsintan dan irigasi antara korluh dan dinas. 4. Kesiediaan BPS menyampaikan data titik KSA agar penyuluh bisa ikut mengawal 5. Pengawalan penyelesaian sodetan rawa kalong sejumlah 300 Ha

No	Kabupaten/Kota	Fasilitasi Lapang	Output Kegiatan
3	Tanggamus	1. Diseminasi benih inpari-32 ke lokasi bencana banjir di Kec. Bandar Negeri Semuong. 2. Pendampingan administrasi dalam upaya rehab bendungan dan jaringan irigasi dinamai "Tebu System" di Kec. Talang Padang dan Kec. Pugung. 3. Pendampingan administrasi dalam Upaya rehab bendungan dan jaringan irigasi dinamai "Mincang System" di Kec. Sumber Rejo dan Kec. Talang Padang 4. Pendampingan administrasi dan lapang dalam upaya perbaikan jaringan irigasi tersier dan Punggung Gajah di Kec. Kota Agung Barat, Kec. Wonosobo, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kec. Semaka, dan Kec. Pematang Sawah. 5. Memberikan informasi dan pendampingan proses distribusi (Melalui Dinas KPTPH) alat dan mesin pertanian.	1. Benih telah didesiminasikan. 2. Bendungan dan jaringan irigasi telah direhab. 3. Progres sudah sampai sampai input kedalam SIPURI 4. Jaringan irigasi tersier telah terbangun pasca bencana banjir 5. Terdistribusi nya 40 buah Mesin Pertanian terdiri dari : TR2, <i>Combine Harvester</i>, Traktor Roda 4.
4	Lampung Selatan	1. Pendampingan dan pelaksanaan Sekolah Lapang Penerapan GAP Padi, Sekolah Lapang Pengendalian OPT Berbasis PHT, manajemen kelembagaan dan jasa alsintan, serta penerapan modernisasi pertanian. 2. Diseminasi varietas biosalin untuk lokasi rawa pasang surut di sentra rawa pasang surut	Peningkatan penerapan GAP padi, pengendalian OPT berbasis PHT, serta pemanfaatan alsintan secara optimal didukung oleh penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha tani padi.
5	Lampung Utara	1. Diseminasi varietas Inpago 13 Fotiz seluas 8 Ha Produksi Benih, dan Diseminasi Inpara 12 seluas 2 Ha	Produksi Benih inpago, peningkatan kapasitas petani, dan kelembagaan petani.

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Lapang	Output Kegiatan
		2. Layanan Diseminasi TOT Padi 3. Layanan Sekolah Lapang GAP Padi 4. Layanan Diseminasi Pelatihan Bisnis Alsintan Poktan/Gapoktan/BP 5. Pelatihan Pelaku Rantai Nilai Usahatani	
6	Waykanan	1. Mengawal proposal bantuan alsintan ke Dirjen PSP melalui Pak Dirjen Horti sebagai PJ LTT Prov.Lampung 2. Memfasilitasi pengadaan rodentisida terkait hama tikus di Kecamatan Bumi Agung. 3. Memfasilitasi proposal perbaikan jaringan irigasi di kecamatan banjit	1. Dua unit alsintan pasca panen (combain hasveter) turun ke petani/Gapoktan. 2. Tersedianya racun tikus pada lokasi yang membutuhkan. 3. Perbaikan irigasi dalam tahap pengerjaan.
7	Pesawaran	Pendampingan pembuatan proposal dan pengajuan proposal antara lain : ▪ Proposal normalisasi sungai BPP Kecamatan Kedondong ▪ Proposal normalisasi sungai BPP Kecamatan Way Lima ▪ Proposal normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi bendungan dan rehabilitasi pintu air bendungan dari Gapoktan Sumber Karya, Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau	Proposal sudah diajukan melalui Dinas TPH Kabupaten dan Dinas KPTPH Provinsi Lampung ditujukan ke Dirjen Irigasi, tetapi proposal belum dilengkapi SID dan RAB, sehingga belum diajukan ke aplikasi sipuri Balai Besar Way Sekampung (BBWS), disebabkan Dinas TPH Kabupaten Pesawaran tidak ada anggaran, rencana anggaran akan diajukan untuk pembuatan SID dan RAB tahun 2026.
8	Pringsewu	1. Mendorong Dinas Pertanian untuk berkomunikasi dan bersurat dengan BBWS untuk pembangunan Tanggul dalam upaya penanganan banjir di Kecamatan Ambarawa 2. Pendampingan petani dan penyuluh mengimplementasikan tanam padi di MT-3 baik sistem semai dan tanam	1. BBWS telah menerima surat dari Dinas Pertanian dan usulan telah masuk dalam rencana pembangunan tanggul tahun 2026 2. Telah terlaksana di beberapa titik lokasi lahan sawah penanaman padi dan penerapan teknologi SALIBU di MT-3 3. Peningkatan pemahaman terkait

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Lapang	Output Kegiatan
		dan penerapan teknologi SALIBU 3. Mendorong petani untuk melakukan percepatan tanam setelah tahapan panen yang dilakukan petani selesai	percepatan tanam dan manfaat penerapannya, yaitu memungkinkan pelaksanaan tanam pada MT III sehingga meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan intensitas tanam dari dua kali menjadi tiga kali
9	Tulang Bawang Barat	Memfasilitasi percepatan listrik masuk sawah	Bersurat ke PLN untuk percepatan Gerakan Listrik Masuk Sawah, dan saat ini sudah masuk instalasi listrik di lokasi sawah yang diusulkan
10	Pesisir Barat	1. Memfasilitasi usulan bantuan alsintan yang diajukan oleh Dinas Pertanian Pesisir Barat ke Penanggung Jawab Swasembada Provinsi 2. Memfasilitasi usulan perbaikan saluran irigasi tersier yang diusulkan Dinas Pertanian Pesisir barat di Kecamatan Pesisir Selatan ke Dinas PU Pesisir Barat 3. Diseminasi benih varietas inpari 32 yang diterapkan di petani penangkar di Kecamatan Karya Punggawa Sebanyak 100 kg 4. Memfasilitasi dan menyampaikan kendala keterlambatan penyaluran pupuk subsidi dari distributor ke kios pertanian ke Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Pupuk Kementan. Keterlambatan disebabkan bencana longsor di jalur lampung Barat-Pesisir Barat	1. Alsintan (traktor, combine harvester) telah terdistribusi. 2. Benih telah diterima oleh poktan penangkar Subur Makmur 3. Saluran irigasi tersier sudah diperbaiki dan sudah berfungsi untuk musim tanam (MT-2) Gadu. 4. Kendala keterlambatan pupuk sudah diatasi dengan mengalihkan penyaluran distribusi pupuk melalui kabupaten Pringsewu dan sebagian masih dari Liwa-Lampung Barat.

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Lapang	Output Kegiatan
11	Bandar Lampung	1. Pengawalan Bantuan alat mesin pertanian Combine Harvester Besar Bimo 102 kepada Gabungan Kelompok Tani Maju Sejahtera Kecamatan Rajabasa. 2. Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pengetahuan LTT program Swasembada pangan dari Penyuluh, fungsional Pertanian oleh Dinas Kab melalui Pertemuan. 3. Pengawalan untuk pengusulan Proposal Listrik Masuk sawah di Kota Bandar Lampung. 4. Pengawalan untuk pengusulan Proposal mesin pompa air sawah di Kota Bandar Lampung. 5. Pengawalan untuk pengusulan Proposal irigasi Sumur dalam di Kota Bandar Lampung 6. Pengawalan penerimaan Bantuan alat mesin pertanian TR2 di Bandar Lampung	1. Alsintan CHB telah di terima dan Dimanfaatkan Kelompok Tani Maju Sejahtera Kecamatan Rajabasa. 2. Melakukan Pertemuan pembahasan LTT Program Swasembada Pangan oleh. 3. Tersusunnya Proposal usulan Listrik Masuk Sawah untuk 2 usulan titik lokasi dari Kota Bandar Lampung. 4. Tersusunnya Proposal usulan mesin pompa air sawah untuk 15 usulan titik lokasi dari Kota Bandar Lampung. 5. Tersusunnya Proposal usulan irigasi sumur dalam untuk 3 usulan di 7 titik lokasi dari Kota Bandar Lampung 6. Alsintan TR2 telah di terima dan Dimanfaatkan Kelompok Tani sebanyak 5 unit : Kelompok Tani Mekar Jaya Kecamatan Rajabasa, Kelompok Tani Maju Bersama Kecamatan Rajabasa, Kelompok Tani Suka Maju I Kecamatan Rajabasa, Kelompok Tani Jaya Bersama Kecamatan Rajabasa, dan Kelompok Tani Harapan Jaya Kecamatan Rajabasa.
12	Kota Metro	1. Fasilitas peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Kota Metro. 2. Mendorong dan pengawalan Proposal pengajuan alsintan 3. Mendorong pelaksanaan MT-3 4. Mendorong Poktan menjadi penangkar benih	1. Pelaksanaan Bimtek dan diseminasi Benih VUB Padi Inpari 32 2. Bantuan alsintan Comben hansplater besar 1 unit di Gapoktan Sumber makmur

No	Kabupaten/Kota	Fasilitasi Lapang	Output Kegiatan
			3. 415 hektar telah melaksanakan MT-3 4. Tersalurkan benih 100 kg untuk penangkar ke metro Utara.

Berdasarkan data pada Tabel 10, fasilitasi lapang BRMP Lampung pada Program Swasembada Pangan Tahun 2025 dilaksanakan secara beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Pada daerah terdampak bencana, seperti Kabupaten Mesuji dan Tanggamus, fasilitasi difokuskan pada diseminasi benih adaptif serta pendampingan rehabilitasi jaringan irigasi guna mempercepat pemulihan produksi padi pasca banjir.

Di beberapa kabupaten lainnya, seperti Lampung Barat, Way Kanan, Pesawaran, dan Pesisir Barat, fasilitasi lebih diarahkan pada pengawalan usulan perbaikan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi dan normalisasi sungai, serta distribusi alsintan. Pendampingan ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan dinas teknis terkait, BUMD, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga kementerian teknis, sehingga proses perencanaan dan pengajuan program dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, di wilayah Lampung Selatan, Lampung Utara, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung, fasilitasi lapang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas petani dan penyuluh melalui sekolah lapang, pelatihan penerapan GAP padi, pengendalian OPT berbasis PHT, diseminasi varietas unggul baru (VUB), serta penguatan kelembagaan dan pengembangan bisnis jasa alsintan. Pendekatan ini mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan keberlanjutan sistem produksi padi.

Secara umum, output kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitasi lapang telah menghasilkan capaian nyata, baik berupa tersalurnya benih dan alsintan, terlaksananya sekolah lapang dan pelatihan, hingga masuknya usulan program strategis ke dalam dokumen perencanaan dan aplikasi pendukung, seperti SIPURI.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fasilitasi lapang BRMP Lampung pada Program Swasembada Pangan Tahun 2025 menunjukkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan petani dan pemerintah daerah dengan kebijakan serta program pemerintah pusat. Pola fasilitasi yang diterapkan bersifat responsif terhadap permasalahan spesifik wilayah, seperti bencana banjir, keterbatasan infrastruktur irigasi, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta kebutuhan percepatan modernisasi pertanian.

Diseminasi benih unggul dan adaptif, termasuk varietas biosalin dan padi gogo, berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan produksi pada lahan suboptimal dan wilayah rawan bencana. Pendampingan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan musim tanam, termasuk mendukung pelaksanaan musim tanam ketiga (MT-3) di beberapa wilayah.

Selain aspek teknis budidaya, fasilitasi lapang juga memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan, sekolah lapang, serta pembinaan usaha jasa alsintan. Kondisi ini mendukung peningkatan efisiensi usaha tani dan optimalisasi pemanfaatan sarana produksi pertanian.

Namun demikian, hasil monitoring dan evaluasi juga menunjukkan masih adanya tantangan, antara lain keterbatasan anggaran daerah, serta kendala distribusi sarana produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, perencanaan yang lebih matang, serta dukungan kebijakan dan pendanaan yang berkelanjutan agar fasilitasi lapang BRMP Lampung dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian swasembada pangan.

3.3.2. Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (ICARE)

Pembangunan pertanian nasional menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan kelembagaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta integrasi hulu ke hilir. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan The World Bank mengembangkan Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) sebagai model pengelolaan Kawasan pertanian secara terintegrasi dengan menghubungkan aspek produksi, pengolahan, pemasaran, serta penguatan kelembagaan petani.

Dalam mendukung implementasi program ICARE, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung sebagai unit Eselon III Badan Perakitan dan Modernisasi Kementerian Pertanian menjadi Project Implementation Unit (PIU) program ICARE. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian memiliki tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRMP Lampung menyelenggarakan berbagai fungsi yang mendukung implementasi Program ICARE, antara lain pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi; pendampingan program pembangunan pertanian; produksi benih dan bibit sumber; bimbingan teknis; serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pendekatan ICARE dapat diterapkan secara efektif.

Program ICARE dilaksanakan sejak tahun 2023 hingga tahun 2027 di sembilan provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 hingga 2024 implementasi program ICARE di Provinsi Lampung difokuskan di Kabupaten Tanggamus dengan pengembangan komoditas spesifik lokasi melalui integrasi kopi-kambing. Pada tahun 2025 fokus lokasi diperluas menjadi lima kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus, Mesuji, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Selatan. Namun, berbeda dengan Kabupaten Tanggamus, empat kabupaten lain difokuskan pada dukungan pencapaian swasembada pangan melalui optimalisasi lahan (OPLAH) yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan, indeks tanam, dan produksi pertanian secara berkelanjutan melalui penyediaan alsintan. Di sisi lain, meskipun fokus utama pada tahun 2025 diarahkan pada optimalisasi lahan, penguatan kelembagaan petani tetap didorong untuk mendukung pengembangan bisnis dan keberlanjutan usaha tani.

A. Jangkauan Program

Sejak awal pelaksanaan hingga tahun 2025, Program ICARE di Provinsi Lampung telah menjangkau koperasi, Brigade Pangan, dan kelompok tani pada komoditas kopi, padi, dan ternak kambing di Kabupaten Tanggamus, Mesuji, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Tulang Bawang Barat. Program ini memperkuat partisipasi petani laki-laki, perempuan, dan pemuda melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Intervensi utama meliputi pelatihan dan ToT Good Agricultural Practices, penguatan manajemen dan model bisnis koperasi, pengembangan kemitraan publik-swasta, dukungan layanan publik, serta fasilitasi alsintan dan praktik pascapanen. Pada rantai nilai kopi di Tanggamus, fokus diarahkan pada peningkatan mutu, tata kelola pascapanen, dan akses pasar; pada padi di Mesuji, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Tulang Bawang Barat pada modernisasi budidaya dan penguatan Brigade Pangan; serta pada ternak kambing pada penguatan manajemen usaha dan integrasi koperasi. Capaian jangkauan program meningkat secara progresif dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah kelembagaan yang diperkuat maupun penerima manfaat yang terlibat, sehingga memperkuat fondasi rantai nilai berbasis kawasan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

B. Capaian Project Development Objectives (PDO)

Capaian Project Development Objective (PDO) ICARE hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa proyek mulai menghasilkan dampak nyata dalam mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, baik dari sisi produktivitas, kelembagaan, maupun jangkauan penerima manfaat. Secara keseluruhan, proyek telah menjangkau 3.118 petani melalui

berbagai layanan dan aset pertanian dari target antara 3.603 petani di tahun 2025, menuju target akhir 10.200 petani pada tahun 2027. Dari jumlah tersebut, 805 merupakan perempuan dan 598 merupakan pemuda, yang menunjukkan bahwa strategi inklusivitas sosial ICARE telah mulai terimplementasi dengan baik di kawasan.

Dari sisi peningkatan kinerja usaha tani, indikator utama PDO menunjukkan hasil yang sangat positif. Persentase peningkatan produktivitas tanaman dan ternak akibat penerapan teknologi pertanian cerdas iklim mencapai 47,9%, melampaui target 30%. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi teknologi, pendampingan teknis, serta adopsi praktik budidaya yang lebih baik telah memberikan dampak signifikan terhadap hasil produksi petani penerima manfaat. Sementara itu, jumlah kemitraan usaha yang difasilitasi proyek telah mencapai 2 kemitraan, melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 1 kemitraan, dan bergerak menuju target akhir 4 kemitraan pada tahun 2027. Namun, indikator peningkatan penjualan pada Korporasi Petani belum dapat diukur pada periode ini karena sebagian besar kemitraan masih berada pada fase awal implementasi dan siklus pemasaran belum sepenuhnya berjalan. Capaian PDO dalam tabel 11.

Tabel 11. Capaian PDO pada indikator “Mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan dan finansial”

No	Indikator	Target PDO	Satuan	Tahun 2025		Target 2027
				Target	Realisasi	
I.	Untuk mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan dan finansial					
1	Proporsi anggota Korporasi Petani yang didukung proyek yang mengalami peningkatan penjualan melalui saluran komersial	80	%	80	-	80
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman dan ternak terpilih dari penerapan teknologi pertanian cerdas iklim di antara penerima manfaat proyek	30	%	30	47,9	30
3	Jumlah kemitraan yang difasilitasi oleh proyek	30	jumlah	1	2	4
4	Petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian	90.000	jumlah	3.603	3.118	10.200
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Perempuan	22.500	jumlah	901	805	2.100
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Pemuda	30.000	jumlah	1.189	598	3.100
	- lainnya	37.500	jumlah	1.513	1715	5.000

Pada Komponen A (Memperkuat rantai nilai di kawasan pertanian terpilih), proyek telah memulai penguatan ekosistem agribisnis lokal melalui pengembangan 1 rencana pengembangan agribisnis lokal dan 2 rencana bisnis Korporasi Petani dari target tahunan 4 rencana bisnis. Meskipun capaian ini masih di bawah target tahunan, proyek telah menunjukkan kualitas proses yang baik, tercermin dari tingginya tingkat kepuasan klien terhadap layanan pertanian yang difasilitasi proyek, yaitu 80%, baik untuk klien secara keseluruhan maupun berdasarkan gender. Selain itu, proporsi

perempuan dalam struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani hanya mencapai 7,1%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kelompok Brigade Pangan pada lokasi OPLAH merupakan kelompok yang telah terbentuk sebelum kawasan OPLAH tersebut didukung oleh Program ICARE, sehingga peran program dalam hal mendukung inklusifitas gender belum sepenuhnya terlaksana pada sebagian besar kelompok dalam struktur kepengurusannya. Hal ini menandakan strategi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan kelembagaan usaha tani perlu ditingkatkan. Capaian PDO pada komponen A disajikan dalam tabel 12.

Tabel 12. Capaian PDO Komponen A : Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian

No	Indikator	Target PDO	Satuan	Tahun 2025		Target 2027
				Target	Realisasi	
II.	Komponen A. Memperkuat rantai nilai di Kawasan Pertanian (klaster zona pertanian) terpilih					
1	Jumlah rencana pengembangan agribisnis lokal yang dikembangkan dan didanai	13	jumlah	1	1	1
2	Jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping (matching grants)	61	jumlah	4	2	4
3	Jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah 2 tahun diberikannya pembiayaan hibah pendamping	10	jumlah	0	0	1
4	Persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani	80	%	80	-	80%
	Persentase petani yang dilatih kemampuan bisnis/usahanya di Korporasi Petani – Perempuan	80	%	80	-	80%
5	Proporsi perempuan di struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani	25	%	25	7,1	25%
6	Persentase petani di Korporasi Petani yang memperoleh manfaat dari infrastruktur yang didukung oleh proyek	80	%	80	-	80%
7	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek	80	%	80	80	80%
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – perempuan	80	%	80	80	80%
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – laki-laki	80	%	80	80	80%

Pada Komponen B (Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan rantai nilai), capaian menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek tata kelola dan adopsi teknologi. Proporsi kursi perwakilan petani dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif mencapai 50%, melampaui target 30%, dan proporsi perempuan dalam perwakilan tersebut telah memenuhi target 50%. Dari sisi inovasi, proyek telah menghasilkan dan menyebarluaskan 10 teknologi pertanian melalui kemitraan kolaboratif, melampaui target antara 4 teknologi. Namun demikian, tingkat adopsi teknologi oleh petani masih relatif rendah, dengan 458 petani yang telah mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik dari target tahunan 3.327 petani, yang di dalamnya termasuk 49 perempuan dan 409 laki-laki. Hal ini

menunjukkan adanya jeda antara ketersediaan teknologi dan kemampuan petani untuk mengimplementasikannya di lapangan. Capaian PDO komponen B disajikan dalam tabel 13.

Di sisi lain, capaian positif terlihat pada penerapan praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dimana 200 hektar lahan telah menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, sesuai dengan target tahun 2025. Proyek juga telah melatih dan mendukung 15 pelaku rantai nilai dan UKM agribisnis, serta 62 pejabat publik dan penyuluh pertanian, meskipun angka ini masih di bawah dari target tahun 2025 dan jauh di bawah target akhir tahun 2027. Hal ini mencerminkan bahwa fase awal proyek masih berfokus pada pembentukan fondasi kapasitas, sebelum dilakukan perluasan skala.

Tabel 13. Capaian PDO Komponen B : Penguatan Kapasitas Institusi Untuk Pengelolaan Rantai Nilai

No	Indikator	Target PDO	Satuan	Tahun 2025		Target 2027
				Target	Realisasi	
III	Komponen B: Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan rantai nilai					
1	Proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh perwakilan petani dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif (competitive grant)	30	%	30	50	30%
	Proporsi perempuan di antara perwakilan petani yang menduduki kursi dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif	50	%	50	50	50%
2	Jumlah hibah kompetitif yang diberikan untuk adaptasi dan diseminasi teknologi	150	jumlah		13	
3	Jumlah teknologi yang diproduksi dan disebarluaskan melalui kemitraan kolaboratif	120	jumlah	4	10	14
4	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik	70.000	jumlah	3327	458	9420
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik -Perempuan	18.750	jumlah	832	49	2355
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik –laki laki	51.250	jumlah	2495	409	7065
5	Luas lahan pertanian di mana praktik-praktik yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diterapkan	7.200	Ha	200	200	800
6	Jumlah pelaku rantai nilai dan pekerja UKM agribisnis di rantai nilai terpilih yang dilatih dan didukung	500	jumlah	15	15	55
7	Jumlah pejabat publik dan penyuluh pertanian yang dilatih untuk memfasilitasi pengembangan rantai nilai dan memberikan layanan pertanian	5.000	jumlah	191	62	500
8	Porsi proposal hibah kompetitif teknologi (competitive technology grant) yang disetujui yang mencakup partisipasi dan investasi sektor swasta	70	%	70		70%

Pada Komponen C (Manajemen Proyek), kinerja implementasi menunjukkan hasil yang solid. Sebanyak 80% pengaduan masyarakat yang masuk melalui Grievance Redress Mechanism (GRM) telah ditangani, sesuai dengan target, sehingga menjaga akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, proyek telah menghasilkan 3 produk pengetahuan dan kegiatan diseminasi, melampaui target tahunan, yang mendukung pembelajaran

proyek dan penyebaran praktik baik antar wilayah di kawasan Program ICARE.

Secara keseluruhan, tren di lapangan menunjukkan bahwa wilayah dukungan dengan koperasi dan Korporasi Petani yang lebih siap secara kelembagaan mampu mencapai kemajuan yang lebih cepat, baik dalam pembentukan kemitraan, penerapan teknologi, maupun penguatan kepemimpinan perempuan. Tantangan utama yang mempengaruhi capaian PDO adalah keterbatasan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi baru, keterlambatan penyusunan rencana bisnis, serta belum optimalnya integrasi pasar pada tahap awal kemitraan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Tim BRMP Lampung selaku PIU ICARE telah memperkuat pendampingan teknis, meningkatkan intensitas pelatihan berbasis praktik, serta memperbaiki mekanisme seleksi dan fasilitasi hibah agar lebih responsif terhadap kebutuhan petani. Ke depan, strategi pencapaian project design diarahkan pada percepatan adopsi teknologi, penguatan kemitraan berbasis pasar, dan peningkatan skala jangkauan penerima manfaat, sehingga dampak produktivitas dan pendapatan petani dapat meningkat secara berkelanjutan hingga target tahun 2027 tercapai. Capaian PDO komponen C disajikan dalam tabel 14.

Tabel 14. Capaian PDO Komponen C: Manajemen Program

No	Indikator	Target PDO	Satuan	Tahun 2025		Target 2027
				Target	Realisasi	
IV	Komponen C: Manajemen Proyek					
1	Persentase Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang ditangani dari total klaim yang diterima	80	%	80	80	80%
2	Jumlah produk-produk pengetahuan yang disusun dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendiseminasi pembelajaran proyek	30	jumlah	1	3	4

3.3.3. Laboratorium Kultur Jaringan

Perbanyak bibit pisang melalui teknologi kultur jaringan merupakan metode yang efektif untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi, seragam, dan bebas patogen. Selama ini, petani pisang umumnya masih menggunakan bibit konvensional berupa anakan, yang jumlahnya terbatas, tidak seragam, serta berpotensi membawa inokulum penyakit. Padahal, Provinsi Lampung memiliki potensi besar sebagai sentra produksi pisang nasional, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi dan mengembangkan varietas pisang bernilai ekonomis tinggi. Salah satu upaya yang relevan adalah penerapan teknologi kultur jaringan sebagai solusi penyediaan bibit unggul secara massal dan berkelanjutan.

Teknologi kultur jaringan dilakukan dengan menumbuhkan bagian tanaman (eksplan) dari tanaman induk yang sehat pada media steril yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh yang sesuai. Keberhasilan teknik ini dipengaruhi oleh jenis eksplan, komposisi media, penggunaan zat

pengatur tumbuh, serta kondisi lingkungan kultur yang aseptik. Media Murashige and Skoog (MS) banyak digunakan karena kandungan unsur hara makro, mikro, dan vitamin yang lengkap. Proses subkultur dilakukan secara bertahap setiap 4–6 minggu untuk memperbanyak tunas dan mempercepat pembelahan sel, sehingga dalam waktu relatif singkat dapat dihasilkan bibit pisang dalam jumlah besar, seragam secara genetik, dan siap mendukung pengembangan kebun komersial skala luas.

Dalam mendukung penyediaan bibit pisang berkualitas tersebut, BRMP Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pertanian berperan melalui pengelolaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). UPBS BRMP Lampung melaksanakan kegiatan pengelolaan dan produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan regulasi dan penugasan resmi dari Menteri Pertanian. Melalui penerapan teknologi perbanyakan vegetatif, termasuk kultur jaringan, BRMP Lampung berkontribusi dalam penyediaan benih dasar dan benih pokok yang bermutu, sehat, dan tersedia secara kontinu guna mendukung peningkatan produktivitas pisang serta keberlanjutan agroindustri hortikultura di Provinsi Lampung.

Jenis pisang yang dihasilkan oleh Laboratorium Kultur Jaringan BRMP Lampung adalah pisang Barangan Merah. Produksi bibit pisang Barangan merah melalui teknik kultur jaringan dimulai dari formulasi media. Tahapan ini mencakup penyediaan larutan stok komponen utama (unsur hara makro, unsur hara mikro, dan vitamin MS) serta larutan NaOH. Total volume seluruh larutan stok yang dihasilkan untuk menunjang kegiatan ini adalah 27.300 mL atau 27,3 Liter.

Tabel 15. Pembuatan Larutan Stok Makro, Mikro, Vit. MS, dan NaOH

No	Hari, Tanggal	Jenis Larutan Stok	Volume (ml)
1	Selasa, 18 Februari 2025	CaCl ₂ .2H ₂ O	1000
2	Selasa, 18 Februari 2025	NaOH	100
3	Selasa, 18 Februari 2025	KNO ₃	1000
4	Selasa, 18 Februari 2025	Vitamin MS	1000
5	Selasa, 18 Februari 2025	FeEDTA	1000
6	Selasa, 18 Februari 2025	Mikro MS	1000
7	Selasa, 18 Februari 2025	NH ₄ NO ₃	1000
8	Selasa, 18 Februari 2025	KNO ₃	1000
9	Selasa, 18 Februari 2025	MgSO ₄ .7H ₂ O	1000
10	Selasa, 18 Februari 2025	KH ₂ PO ₄	1000
11	Selasa, 18 Februari 2025	Myoinositol	1000
12	Kamis, 12 Juni 2025	Mikro MS	1000
13	Kamis, 12 Juni 2025	KH ₂ PO ₄	1000

No	Hari, Tanggal	Jenis Larutan Stok	Volume (ml)
14	Kamis, 12 Juni 2025	CaCl ₂ .2H ₂ O	1000
15	Kamis, 12 Juni 2025	MgSO ₄ .7H ₂ O	1000
16	Kamis, 12 Juni 2025	NH ₄ NO ₃	1000
17	Kamis, 12 Juni 2025	KNO ₃	1000
18	Kamis, 12 Juni 2025	NaOH	100
19	Kamis, 12 Juni 2025	CaCl ₂ .2H ₂ O	1000
20	Kamis, 12 Juni 2025	Vitamin MS	1000
21	Kamis, 12 Juni 2025	FeEDTA	1000
22	Kamis, 12 Juni 2025	Myoinositol	1000
23	Rabu, 11 September 2025	Mikro MS	1000
24	Rabu, 11 September 2025	KH ₂ PO ₄	1000
25	Rabu, 11 September 2025	CaCl ₂ .2H ₂ O	1000
26	Kamis, 30 Oktober 2025	MgSO ₄ .7H ₂ O	1000
27	Kamis, 30 Oktober 2025	NH ₄ NO ₃	1000
28	Kamis, 30 Oktober 2025	KNO ₃	1000
29	Kamis, 30 Oktober 2025	NaOH	100
30	Kamis, 30 Oktober 2025	CaCl ₂ .2H ₂ O	1000
Total Pembuatan Larutan Stok Makro, Mikro, Vit. MS, dan NaOH			27.300 mL atau 27,3 Liter

Pembuatan larutan stok Zat Pengatur Tumbuh sebanyak 200 mL IAA, 200 mL BAP, dan 250 mL TDz.

Tabel 16. Pembuatan Larutan Stok Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)

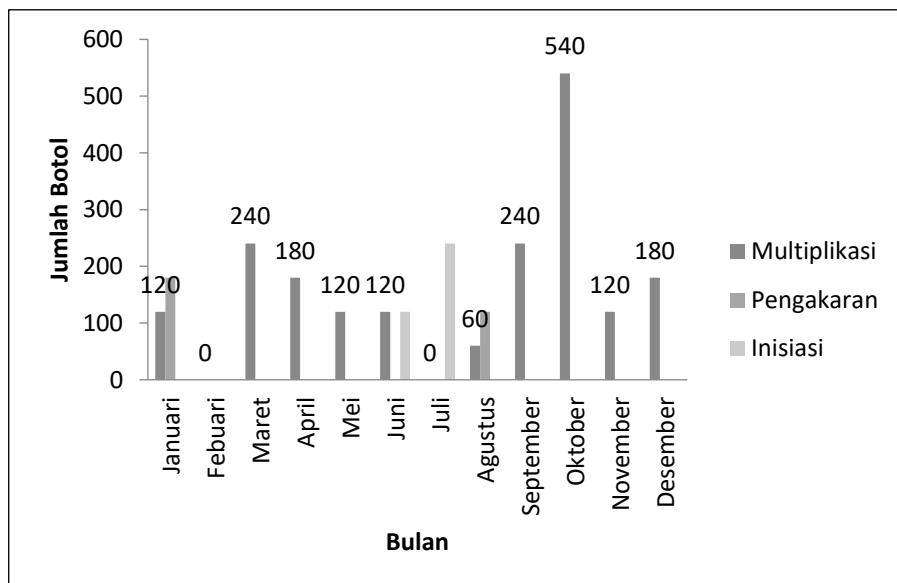
No	Hari, Tanggal	Jenis ZPT	Volume (ml)
1	Selasa, 8 April 2025	IAA	100
2	Kamis, 17 Juli 2025	BAP	100
3	Kamis, 17 Juli 2025	IAA	100
4	Jum'at, 28 November 2025	BAP	100
5	Jum'at, 28 November 2025	TDz	200
Total		• IAA = 200 mL • BAP = 200 mL • TDz = 250 mL	

Pembuatan media dilakukan dengan 3 jenis media yang berbeda menyesuaikan tahapan planlet yaitu media inisiasi, multiplikasi, dan pengakaran. Rekapitulasi pembuatan media selama 12 bulan yaitu media

multiplikasi sebanyak 1.920 botol atau 64 liter, media pengakaran 300 botol atau 10 liter dan media inisiasi 360 botol atau 12 liter.

Tabel 17. Rekapitulasi perkembangan pembuatan media

No	Bulan	Jenis Media (Botol)		
		Multiplikasi	Pengakaran	Inisiasi
1	Januari	120	180	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	240	-	-
4	April	180	-	-
5	Mei	120	-	-
6	Juni	120	-	120
7	Juli	-	-	240
8	Agustus	60	120	-
9	September	240	-	-
10	Oktober	540	-	-
11	November	120	-	-
12	Desember	180	-	-
Total		1.920	300	360



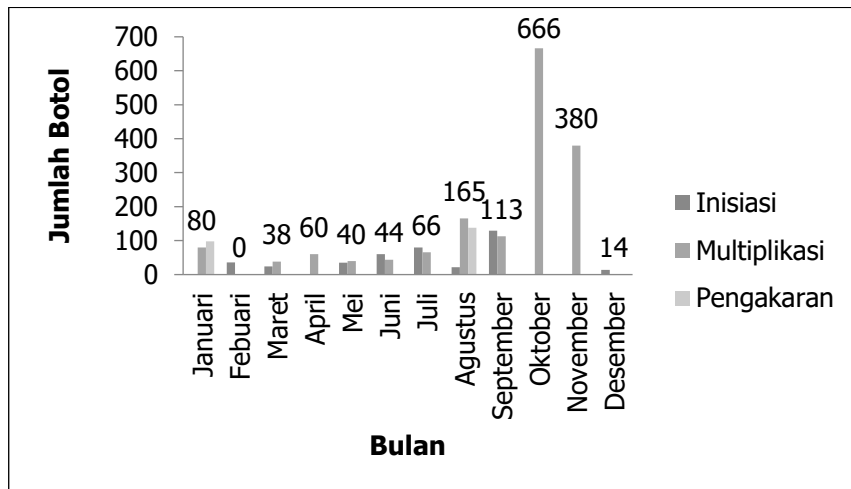
Gambar 41. Rekapitulasi perkembangan pembuatan media selama 12 bulan

Tahap perbanyak Pisang Barangan merah di dalam laboratorium adalah Subkultur. Subkultur yang dilakukan terdiri dari 3 tahap yaitu inisiasi, multiplikasi, dan pengakaran. Rekapitulasi subkultur selama 12 bulan antara lain tahap inisiasi sebanyak 400 botol, tahap multiplikasi sebanyak 1.702 botol, dan tahap pengakaran 236 botol.

Tabel 18. Rekapitulasi perkembangan subkultur

No	Bulan	Tahap Subkultur (Botol)		
		Inisiasi	Multiplikasi	Pengakaran
1	Januari	-	80	98
2	Februari	36	-	-
3	Maret	24	38	-
4	April	-	60	-
5	Mei	35	40	-
6	Juni	60	44	-
7	Juli	80	66	-
8	Agustus	22	165	138
9	September	129	113	-
10	Oktober	-	666	-
11	November	-	380	-

No	Bulan	Tahap Subkultur (Botol)		
		Inisiasi	Multiplikasi	Pengakaran
12	Desember	14	-	-
Total		400	1.702	236



Gambar 42. Rekapitulasi perkembangan subkultur selama 12 Bulan

Tahap perbanyakkan Pisang Barangan merah di luar laboratorium adalah Aklimatisasi. Total seluruh Aklimatisasi adalah 2.180 tanaman, total yang hidup yaitu 1.974, dan yang mati 206 tanaman. Sehingga persentase keberhasilannya adalah 90,55% dan kematiannya adalah 9,45%.

Tabel 19. Rekapitulasi Aklimatisasi

No	Hari, Tanggal	Jumlah Aklimatisasi (Planlet)	Hidup (Planlet)	Mati (Planlet)
1	Rabu, 12 Maret 2025	225	200	25
2	Selasa, 16 September 2025	275	255	20
3	Selasa, 14 Oktober 2025	480	445	35
4	Kamis, 23 Oktober 2025	240	193	47
5	Rabu, 19 November 2025	240	212	28
6	Kamis, 4 Desember 2025	240	219	21
7	Jum'at, 12 Desember 2025	240	216	24

8	Selasa, 16 Desember 2025	240	234	6
Total Aklimatisasi		2.180	1.974	206

Pembuatan larutan stok Alkohol 70% juga diperlukan untuk sterilisasi, rekapitulasi pembuatan stok tersebut yaitu sebanyak 32 Liter.

Tabel 20. Pembuatan Stok Alkohol 70%

No	Hari, Tanggal	Volume (L)
1	Rabu, 15 Januari 2025	2
2	Senin, 10 Februari 2025	2
3	Jum'at, 21 Maret 2025	4
4	Rabu, 17 April 2025	2
5	Jum'at, 16 Mei 2025	2
6	Senin, 23 Juni 2025	4
7	Selasa, 15 Juli 2025	2
8	Jum'at, 22 Agustus 2025	4
9	Kamis, 11 September 2025	4
10	Rabu, 29 Oktober 2025	2
11	Kamis, 13 November 2025	2
12	Jum'at, 12 Desember 2025	2
Total		32 Liter larutan Stok Alkohol 70%

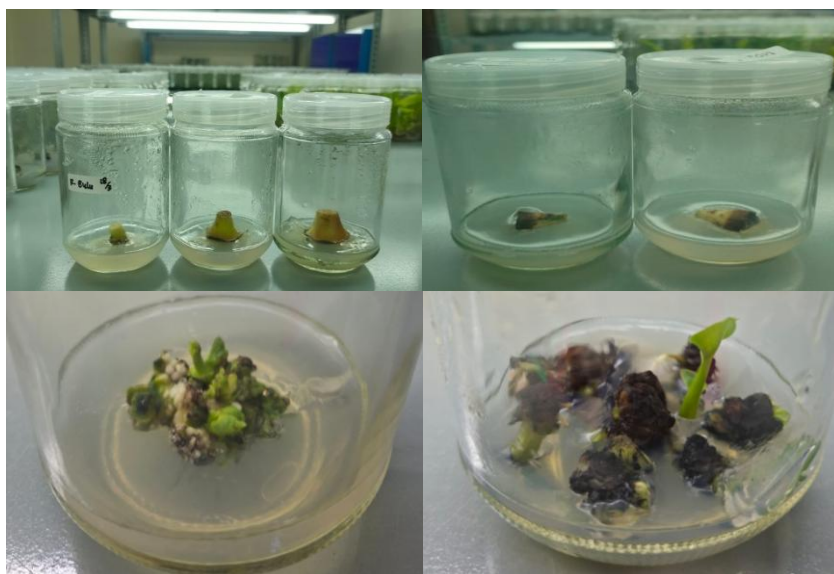
Tabel 21. Rekapitulasi Komoditas Laboratorium Kultur Jaringan

No	Nama Komoditas	Varietas	Kelas
1.	Pisang	Barangan Merah	ES/BR
2.	Pisang	Kepok Tanjung	ES/BR
3.	Pisang	Raja bulu	ES/BR
4.	Anggrek	Dendrobium Nicha scarab	ES/BR
5.	Anggrek	Dendrobium Brown pixie	ES/BR
6.	Anggrek	Dendrobium Nods	ES/BR

7.	Anggrek	Dendrobium Striaenopsis	ES/BR
8.	Anggrek	Dendrobium Linda febriana x Nindii	ES/BR
9.	Kelapa	Kelapa Puan Kalianda	ES/BR



Gambar 43. Kondisi planlet pisang Barangan Merah, pada gambar a planlet belum siap aklimatisasi (kiri) dan planlet siap aklimatisasi (kanan), sedangkan pada gambar b jumlah planlet yang telah siap aklimatisasi.



Gambar 44. Kondisi planlet pisang Raja Bulu, pada gambar a dan b tahap inisiasi, gambar c setelah 1 bulan inisiasi, sedangkan pada gambar d tahap multiplikasi

3.3.4. Predikat Informatif

BRMP Lampung telah melaksanakan partisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan serta Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Pertanian yang diselenggarakan di Aula Auditorium Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dan bertujuan untuk memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi kehumasan tersebut menjadi forum strategis dalam melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan penguatan peran kehumasan di masing-masing unit kerja. Melalui kegiatan ini, dilakukan penyampaian kebijakan, arahan, serta evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian nasional secara efektif dan komunikatif.

Dalam kegiatan tersebut, BRMP Lampung memperoleh predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Predikat ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen BRMP Lampung dalam menyediakan dan mengelola layanan informasi publik yang terbuka, mudah diakses oleh masyarakat, transparan, serta sesuai dengan standar layanan informasi publik yang ditetapkan.

Capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja sama seluruh unsur di lingkungan BRMP Lampung dalam mendukung keterbukaan informasi dan penguatan fungsi kehumasan. Ke depan, BRMP Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengoptimalkan komunikasi publik sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya pembangunan pertanian yang modern dan berkelanjutan.



Gambar 45. Penerimaan penghargaan Unit Kerja Eselon III Informatif



Gambar 46. Sertifikat penghargaan Unit Kerja Eselon III

3.3.5. Penyediaan Informasi melalui Website dan Media Sosial

Pengunggahan bahan tayang ke portal website BRMP Lampung dilaksanakan oleh admin yang telah ditunjuk sebagai pengelola situs web. Bahan informasi berupa naskah diunggah dalam format HTML sehingga dapat ditampilkan dan dibaca langsung pada menu utama website, baik dalam bentuk berita maupun informasi teknologi. Sementara itu, bahan berita dalam format PDF terlebih dahulu diunggah ke dalam server media control untuk disimpan, kemudian ditautkan (link) ke menu utama website yang telah disediakan.

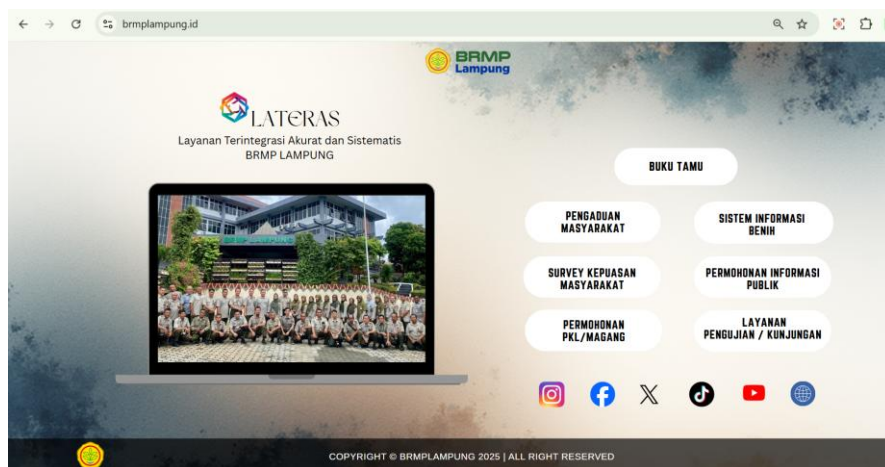
Pengelolaan konten pada media sosial BRMP Lampung, seperti Facebook Page, Instagram, dan Twitter, dilakukan melalui tahapan penyuntingan oleh editor yang telah ditetapkan. Setelah melalui proses editing, materi berita atau informasi tersebut diunggah secara serentak ke ketiga platform media sosial oleh admin yang ditunjuk, guna memastikan keseragaman dan konsistensi penyampaian informasi kepada publik.

Selain melalui website dan media sosial, penyediaan informasi, layanan konsultasi, serta rekomendasi penerapan standar juga dilaksanakan melalui berbagai kanal komunikasi yang dimiliki oleh BRMP Lampung, antara lain Facebook, YouTube, Instagram, media daring, serta media cetak berupa leaflet. Jumlah penyediaan informasi teknologi melalui media sosial, media cetak, dan media lainnya disajikan dalam Tabel 14.

Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh BRMP Lampung adalah pengembangan sistem informasi terintegrasi yang menyediakan informasi layanan BRMP 2025. Sistem informasi tersebut diberi nama Lateras, yaitu Layanan Terintegrasi Akurat dan Sistematis. Lateras dapat diakses melalui tautan www.brmplampung.id. Layanan yang tersedia antara lain adalah pengaduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat, permohonan PKL/magang, sistem informasi benih, permohonan informasi publik, dan layanan pengujian/kunjungan.

Tabel 22. Penyajian informasi melalui website dan media sosial

No	Jenis Media	Jumlah Informasi yang disediakan
1.	Youtube BRMP Lampung	93
2.	Facebook BRMP Lampung	537
3.	Instagram BSIP Lampung	537
4.	Twitter BPSIP Lampung	537
5.	Website	400
6.	Tik Tok	112



Gambar 47. Tampilan Lateras

3.3.6. Pelayanan Magang/Praktek Kerja Lapang Siswa atau Mahasiswa

Sebagai bagian dari komitmen dalam penyebaran informasi serta layanan konsultasi terkait penerapan standar instrumen pertanian, BRMP Lampung membuka ruang kolaborasi dengan dunia pendidikan melalui layanan publik berupa penerimaan peserta magang atau Praktik Kerja Lapang (PKL). Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran teoritis di bangku pendidikan dengan praktik nyata di lapangan, khususnya dalam mendukung modernisasi pertanian. Melalui program magang dan PKL tersebut, peserta didik memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas teknis yang dilaksanakan di lingkungan balai. Peserta dibekali pengalaman praktis mulai dari pengenalan tugas dan fungsi balai, pemahaman prosedur pengujian dan pelayanan teknis, hingga pengenalan teknologi spesifik lokasi yang sedang dikembangkan oleh BRMP Lampung.

Respons dari institusi pendidikan terhadap program ini menunjukkan antusiasme yang positif. Hingga akhir tahun 2025, BRMP Lampung telah memfasilitasi sebanyak 63 orang siswa dan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja profesional di lingkungan balai. Partisipasi tersebut mencerminkan peran aktif BRMP Lampung dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian sejak dini. Rincian asal instansi pendidikan serta data peserta magang selama periode berjalan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa Praktek Kerja lapang di BRMP Lampung 2025

No	Universitas/SMK	Jumlah Mahasiswa/Siswa PKL
1	SMKN- SPP Lampung	5

No	Universitas/SMK	Jumlah Mahasiswa/Siswa PKL
2	Universitas Lampung	24
3	Universitas Sriwijaya Palembang	2
4	SMK Budi Karya Natar	5
5	Institut Sumatera Lampung	3
6	SMK Yadika Natar	2
7	Universitas Teknokrat Indonesia	3
8	Universitas Gunadarma	1
9	Universitas Raden Intan Negeri Lampung	3
10	Universitas Dharma Wacana Metro	4
11	Politeknik Negeri Lampung	11
Total		63

3.3.7. Pelayanan Laboratorium Tanah

Jumlah sampel yang diterima laboratorium pada tahun 2025 sebanyak 256 sampel, sebagian besar merupakan sampel tanah 51,17%, pupuk organik 14,07%, dan tanaman 34,76%. Sampel tanah yang masuk merupakan sampel yang berasal dari mahasiswa, pihak swasta dan instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui kandungan unsur hara pada penelitian yang mereka lakukan. Data jenis sampel disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 24. Jumlah Layanan Laboratorium Tanah tahun 2025

No	Jenis layanan laborattorium	Jumlah Uji	Persentase
1	Uji Tanah	131	51,17%
2	Uji Tanaman	36	14,07%
3	Uji Pupuk Organik	89	34,76%
Total		256	

3.4. Akuntabilitas Keuangan

3.4.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pagu Tahun 2025 setelah revisi anggaran ke-23 adalah sebesar Rp. 18.466.439.000,- (Delapan belas milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pagu efektif sebesar Rp. 18.417.169.000,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta

seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian pagu sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 5.070.345.000,-
- Belanja Barang Operasional Rp. 3.508.004.000,-
- Belanja Barang Non Operasional Rp. 9.153.660.000,-
- Belanja Modal Rp. 685.160.000,-

Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 berdasarkan SP2D adalah sebesar Rp. 17.985.378.495,- (Tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) atau 97,39% terhadap pagu total, dan 97,66% terhadap pagu efektif di mana pada TA 2025 terdapat pagu yang diblokir yakni belanja barang sebesar Rp. 49.270.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total pagu anggaran tahun 2025 setelah revisi. Capaian tersebut telah melebihi target realisasi anggaran yang diusulkan melalui surat usulan B-531/RC.020/H/12/9/9/2025, dimana target realisasi anggaran adalah 97,46%. Uraian realisasi anggaran BRMP Lampung tahun 2025 disajikan dalam tabel 25.

Tabel 25. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025

Uraian	Target/Anggaran (RP)	Realisasi	
		Rp	%
1. RealisasiPendapatan Negara			
▪ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	62.041.000	61.986.600	99,91
▪ Penerimaan Hibah	-	-	-
2. Realisasi belanja Negara			
A. Rupiah Murni			
▪ Belanja Pegawai	5.070.345.000	5.035.008.542	99,30
▪ Belanja Barang Operasional	3.508.004.000	3.493.637.051	99,59
▪ Belanja Non Operasional	9.153.660.000	8.786.034.352	95,98
▪ Belanja Modal	685.160.000	670.698.550	97,89

Target Pendapatan Negara Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung TA 2025 adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) berupa penerimaan fungsional yang berasal dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar Rp. 64,271.800,- (Enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), serta dari pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya sebesar Rp. 42.348.000,- (Empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Rincian perkiraan tarif penerimaan dan realisasi PNPB lainnya tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 26. Penerimaan dan Realisasi PNBP BRMP Lampung Bulan Desember 2025

Uraian	Target/Anggaran (RP)	Realisasi	
		Rp	%
Penerimaan Umum			
▪ Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara	-	-	-
▪ Pendapatan Kembali TAYL (Belanja Pegawai)	-	-	-
▪ Pendapatan Kembali TAYL (Belanja Barang)	-	-	-
▪ Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	-	-
Jumlah Penerimaan	-	-	-
Penerimaan Fungsional			
▪ Pendapatan Laboratorium	24.960.000	42.348.000	169,66
▪ Pendapatan Hasil Pertanian	60.040.000	64.271.800	107,05
• Jasa Penggunaan Sarana	-	6.629.681	-
Jumlah Penerimaan	-	-	
Total Pendapatan	85.000.000	104.819.800	123,32

BAB IV PENUTUP

Secara umum, kinerja BRMP Lampung tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan telah mampu mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dari empat indikator kinerja utama yang menjadi target pada tahun 2025, seluruhnya telah berhasil dipenuhi. Capaian tersebut meliputi terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dengan realisasi 1 lembaga dari target 1 lembaga, tersedianya benih/bibit sumber spesifik lokasi sebesar 130,63 ton dari target 120 ton, capaian nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM sebesar 84,49 dari target 82,11, serta nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93,82 dari target 91. Dengan capaian tersebut, sebagian besar indikator kinerja berada pada kategori sangat berhasil, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BRMP Lampung sepanjang tahun 2025.

Meskipun demikian, pelaksanaan kinerja BRMP Lampung pada tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan. Perubahan nomenklatur dari Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berdampak pada penyesuaian administrasi, penganggaran, dan tata kelola organisasi. Selain itu, adanya sebagian anggaran yang diblokir serta keterlambatan efektivitas DIPA menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru dapat berjalan optimal pada triwulan III. Kondisi tersebut mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi relatif sempit, sehingga menuntut optimalisasi sumber daya manusia dalam menyelesaikan berbagai kegiatan secara bersamaan. Ke depan, BRMP Lampung perlu memperkuat perencanaan sejak awal tahun, meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan digitalisasi proses bisnis agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Data Kepegawaian

A. Sumber Daya Manusia BRMP Lampung tahun 2025 per Desember 2025

No	Jabatan	Katagori SDM ASN			Jumlah	%
		PNS	CPNS	PPPK/PPPK PW		
1	Struktural	2	0	0	2	2
2	Fungsional Tertentu	29	9	3	41	44
3	Fungsional Umum/Pelaksana	26	0	25	51	54
Jumlah					94	100

B. Rekapitulasi berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang BRMP Lampung tahun 2025 per Desember 2025

NO	GOLONGAN	RUANG					JUMLAH
		A	B	C	D	E	
I	PNS / CPNS						
	I	0	0	0	0		0

NO	GOLONGAN	RUANG					JUMLAH
		A	B	C	D	E	
	II	0	2	6	6		14
	III	20	8	10	8		46
	IV	4	2	0	0	0	6
II	PPPK						
	IX						3
	V						7
	PPPK PW						
	IX						1
	V						11
	I						6
JUMLAH							94

C. Jumlah dan sebaran jabatan struktural, fungsional tertentu dan pelaksana di BRMP Lampung tahun 2025 per Desember 2025

NO	JABATAN	JUMLAH	PNS	CPNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU
I	STRUKTURAL	2	2			
1	ADMINISTRATOR / KEPALA BALAI		1			
2	PENGAWAS / Kepala Subbagian Tata Usaha		1			
II	FUNGSIONAL TERTENTU	41	29	9	3	
1	PENYULUH PERTANIAN	13				
	MADYA		3			
	MUDA		7			
	PERTAMA		2			
2	PMHP	6				
	MUDA		1			
	PERTAMA		2	2	1	
3	PBT	4				
	PERTAMA		2	1	1	

NO	JABATAN	JUMLAH	PNS	CPNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU
4	ASTA	6				
	PERTAMA		2	3	1	
5	PRAHUM	1				
	PERTAMA			1		
6	ASDMA	1				
	PERTAMA			1		
7	PERENCANA	1				
	PERTAMA			1		
8	APT	2				
	MUDA		2			
9	PKT	1				
	TERAMPIL		1			
10	TEKLIT	7				
	PENYELIA		1			
	MAHIR		1			
	TERAMPIL		4			
	PERTAMA		1			
III	PELAKSANA	51	26		7	18
1	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	6			
2	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	2		1	
3	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	8	8			
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	26	9		6	11
5	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	1			
6	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1				1
7	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	6				6
JUMLAH		94	57	9	10	18

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP 2025 (PK awal)

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG JL. HI. Z.A. PAGAR ALAM NO.1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA TELEPON: (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273 WEBSITE: lampung.bsip.pertanian.go.id E-Mail: bsip.lampung@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Rachman Jaya	
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry	
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Bandar Lampung, 30 Desember 2024	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Fadry Djufry	Rachman Jaya

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	3. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		4. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	5.874.874.000
		Rp	5.874.874.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	-
		Rp	-
3	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	8.749.376.000
		Rp	8.749.376.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian


Fadry Djufry

Bandar Lampung, 30 Desember 2024
Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Lampung


Rachman Jaya

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
		TOTAL	UNIT	

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP 2025 (PK revisi 1)

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG JL. HI. Z. A. PAGAR ALAM NO. 1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA TELEPON : (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273 WEBSITE: lampung.bmp.pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Endro Gunawan Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jakarta, 26 Mei 2025 Pihak Pertama
 Fadry Djufry	 Endro Gunawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	120
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	5.874.874.000
	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp	5.874.874.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	1.863.120.000
	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	1.863.120.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	10.399.376.000
	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp	10.399.376.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 6.762.035.000, terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 5.874.874.000
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 7.555.000
- Program Dukungan Manajemen Rp. 879.606.000

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Endro Gunawan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	120	Ton
		TOTAL		Ton

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja (PK) BRMP 2025 (PK revisi 2)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
JALAN HI. Z. A. PAGAR ALAM NOMOR 1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA
TELEPON (0721) 781776, FAKSIMILI (0721) 705273
WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Endro Gunawan

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama

Fadry Djufry

Endro Gunawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani	1.1. Jumlah Lembaga Penerap Standar yang Mendapatkan Pendampingan	1,00	Lembaga
2	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang Dihasilkan	120,00	Unit
3	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	3.1. Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan <i>Modern</i>	-	Orang
LAINNYA				
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	82,11	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	91,00	Nilai (0-100)

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 6.944.970.000
7911	Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp 6.944.970.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 1.863.120.000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 1.863.120.000
WA	Dukungan Manajemen	Rp 9.658.349.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 9.658.349.000
		Rp 18.466.439.000

Total anggaran terblokir senilai Rp 49.270.000, terdiri dari:

- Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 3.141.000
- Program Dukungan Manajemen Rp 46.129.000

Pihak Kedua,

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama,

Fadjry Djufry


Endro Gunawan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	14,58	Ton
		Produksi calon benih FS	-	Ton
		Produksi calon benih SS	105,42	Ton
TOTAL			120,00	Ton

Lampiran 6. Komitmen Realisasi Anggaran



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
JALAN HI. Z. A. PAGAR ALAM NOMOR 1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA
TELEPON (0721) 781776, FAKSIMILI (0721) 705273
WEBSITE: lampung.bmp.pertanian.go.id

Nomor : B-531/RC.020/H.12.9/9/2025 26 September 2025
Lampiran : 1 (rangkap)
Perihal : Target Realisasi Anggaran dan Langkah Percepatan Pelaksanaan Tahun 2025

Yth.
Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan
Modernisasi Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor B-3046/RC.020/H.12/09/2025 tanggal 26 September 2025 mengenai Target Realisasi Anggaran dan Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, bersama ini disampaikan target realisasi fisik dan anggaran dan Langkah-langkah percepatan anggaran sampai dengan Desember 2025 BRMP Lampung (terlampir).

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan percepatan realisasi anggaran, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan Identifikasi dan inventarisasi anggaran yang masih tersedia;
2. Melakukan Belanja modal melalui e-katalog untuk mempercepat proses pembelanjaan;
3. Mempercepat penyelesaian administrasi keuangan dan pembayaran belanja kegiatan yang sudah selesai;
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga belanja yang belum terserap dapat segera realisasi;
5. Menginventarisasi lebih detil anggaran yang berpotensi tersisa untuk di alihkan ke kegiatan lainnya dengan melakukan revisi POK;
6. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD).

Langkah-langkah strategis di atas akan kami pergunakan untuk melakukan percepatan realisasi anggaran dan capaian output kinerja.

Atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001

Tembusan:
Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Lampung
Nomor : B-531/RC.020/H.12.9/9/2025
Tanggal : 29 September 2025

Sakher	Pagu Total (Rp)	Blok (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi s.d. 28 September 2025 (Rp)	% Pagi Efektif	Outstanding Contract ONGSPAN per 28 Sep 2025	Outstanding Contract Efektif versi VI per 28 Sept 2025	Sisa Total (Rp)	Target Rencana Anggaran (Kumulatif)							
									September	Oktober	November	Desember	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
BRMP Lampung	35.347.910.000	789.948.000	14.599.452.000	7.363.452.045	54,36%			6.944.854.965	8.274.512.303	95,46	16.476.532.306	71,96	13.966.512.306	93,97	14.988.033.353	97,46
51 Betara Pagan	5.070.345.000		5.070.345.000	4.147.759.487	81,80%			822.636.513	4.148.634.379	81,82	4.928.634.379	89,51	4.928.634.379	97,21	5.020.135.000	99,60
52 Betara Barang	9.779.185.000	361.048.000	9.476.117.000	3.709.860.553	39,74%			5.710.218.447	3.928.869.561	41,43	5.928.869.561	60,54	8.728.869.561	92,09	9.118.869.561	96,32
53 Betara Modal	500.000.000	498.000.000	12.000.000	-	0,00%			12.000.000	0	0,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7. Manual IKU

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG

Sasaran dan Indikator Kinerja: BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	Teknologi
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Unit
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern (Jumlah)	Orang
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5. Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (Nilai)	Nilai
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (Nilai)	Nilai

1. Manual Indikator 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga)

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	Tervujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan Formula Menghitung jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan Tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian
Satuan	Lembaga
Target	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta

Metode Cascading	☐ Non Cascading ☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung								
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar</td><td>Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.</td></tr> <tr> <td>Penerapan standar tidak konsisten</td><td>Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.	Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang		
Potensi Risiko	Mitigasi								
rendahnya jumlah lembaga yang menerapkan standar	Pendampingan teknis berkelanjutan, dan pelatihan berbasis praktik.								
Penerapan standar tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi berkala, dan penggunaan checklist penerapan standar di tingkat lapang								
Catatan									

2. Manual Indikator 2: Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah teknologi pertanian yang adaptif pada tahun berjalan. Formula Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan Tujuan mendapatkan mengukur kinerja dan capaian teknologi pertanian adaptif sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, maupun kesenjangan digital/modernisasi
Satuan	Teknologi
Target	2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 2 2029: 2
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize										
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung										
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung										
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir										
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan										
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas petani.</td><td>Melakukan uji multlokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td></tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td><td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td></tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td><td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas petani.	Melakukan uji multlokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.		
Potensi Risiko	Mitigasi										
Teknologi kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas petani.	Melakukan uji multlokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.										
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.										
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.										
Catatan											

3. Manual Indikator 2: Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (unit)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (%)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah. Formula Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan Tujuan untuk menyediakan benih/bibit spesifik lokasi yang unggul dan bermutu, adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat, dan menjamin ketersediaannya.
Satuan	Unit
Target	2025: 120 2026: 159 2027: 13.500 2028: 14.500 2029: 15.000
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung								
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat</td><td>Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya</td></tr> <tr> <td>Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.</td><td>Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.</td></tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td><td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya	Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.
Potensi Risiko	Mitigasi								
Produksi benih/bibit tidak optimal karena varietas kurang adaptif terhadap agroekosistem setempat	Memilih varietas unggul adaptif, dan penyesuaian paket teknologi budidaya								
Banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit menurunkan hasil dan mutu benih.	Menggunakan VUB sesuai musim, penentuan kalender tanam secara tepat, Pengendalian Hama Terpadu, dan penggunaan benih sehat.								
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.								
Catatan	Produksi Benih Sumber mencakup benih sumber yang telah tersertifikasi serta calon benih sumber yang masih dalam proses produksi dan belum memperoleh sertifikasi, yang perhitungannya dimaksudkan untuk mencerminkan kapasitas produksi benih sumber pada periode berjalan.								

4. Manual Indikator 4: Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (orang)

Program	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
Definisi Sasaran Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (Jumlah)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern pada tahun berjalan. Formula Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern Tujuan Untuk melihat gambaran tingkat penerapan modernisasi pertanian di tingkat pelaku utama, sebagai dasar evaluasi efektivitas diseminasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan
Satuan	Orang
Target	2025: 0 2026: 375 2027: 750 2028: 1.125 2029: 1.500
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung

	☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)								
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize								
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung								
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir								
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan								
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.</td><td>Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.</td></tr> <tr> <td>Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani</td><td>Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.</td></tr> <tr> <td>Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan</td><td>Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.</td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.	Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.	Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.
Potensi Risiko	Mitigasi								
Teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern kurang optimal diadopsi karena perbedaan agroekosistem, sosial, dan kapasitas pelaku.	Melakukan uji multilokasi, penyempurnaan desain teknologi, serta penyesuaian berbasis umpan balik pengguna.								
Keterbatasan pemahaman dan keterampilan petani	Pelatihan aplikatif, bimbingan lapang, dan menyusun modul sederhana.								
Minimnya dukungan kelembagaan dan pendampingan	Optimalisasi peran penyuluh, serta diseminasi teknologi adaptif kepada stakeholders lainnya.								
Catatan	- teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modern yang diterapkan bisa salah satu atau kombinasi antara teknologi digital, <i>smart farming</i>, dan modernisasi - Teknologi digital dapat berupa aplikasi SIAP TANAM, aplikasi digital pertanian lainnya, dll <i>Smart farming</i> dapat berupa penggunaan varietas unggul bersertifikat, pupuk dan pestisida tepat dosis, waktu dan cara, penggunaan air yang efektif, serta pertanian presisi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan (penggunaan sensor dan IoT, sistem monitoring digital, sistem otomatis) <i>Modern farming</i> adalah pemanfaatan mekanisasi dalam proses pertanian seperti penggunaan traktor, drone, alat tanam dan lainnya yang efektif dan efisien.								

5. Manual Indikator 5: Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien melalui tata kelola yang akuntabel, proses kerja terstandar dan berbasis digital, serta pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada layanan prima di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung adalah tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang mencerminkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Formula Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil penilaian Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BRMP Tujuan Mewujudkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung yang berintegritas dan profesional melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Satuan	Nilai
Target	2025: 82,11 2026: 84,49 2027: 84,75 2028: 84,85 2029: 85
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada

Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)										
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya										
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High										
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact										
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading										
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize										
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung										
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung										
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir										
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan										
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja</td><td>Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.</td></tr> <tr> <td>Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.</td><td>updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.</td></tr> <tr> <td>Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.</td><td>Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.</td></tr> <tr> <td>SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas</td><td>Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata</td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.	Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.	Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.	SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata
Potensi Risiko	Mitigasi										
Pembangunan ZI hanya bersifat administratif dan belum menjadi budaya kerja	Penetapan komitmen bersama, internalisasi nilai ZI, serta penilaian kinerja berbasis integritas.										
Pemenuhan eviden tidak konsisten dan tidak berkelanjutan.	updating eviden berkala, serta penunjukan PIC untuk mengumpulkan eviden.										
Benih tidak lolos sertifikasi akibat pencemaran varietas, kadar air tinggi, atau daya kecambah rendah.	Penerapan SOP produksi benih secara ketat, pemurnian varietas, pengawasan lapang intensif, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi.										
SOP tidak sepenuhnya diterapkan, layanan belum efektif, dan inovasi terbatas	Penyederhanaan SOP, digitalisasi layanan, dan pengembangan inovasi yang berdampak nyata										
Catatan											

Manual Indikator 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (Nilai)

Program	Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, patuh regulasi, serta efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung (Nilai)
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA. Formula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung secara otomatis akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu Tujuan Mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, patuh regulasi, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja.
Satuan	Nilai
Target	2025: 91 2026: 91,5 2027: 92 2028: 92,5 2029: 93
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Badan Perakitan dan Modernisasi/ Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Tidak ada
Dukungan Indikator Kinerja Program	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu

	☐ Waktu ☐ Biaya										
Tingkat Kendali	☒ Low ☐ Moderate ☐ High										
Tingkat Validitas	☐ Activity ☐ Proxy ☒ Exact										
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading										
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)										
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize										
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung										
Sumber Data	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung										
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir										
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan										
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th><th>Mitigasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat</td><td>Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistik dan tenukur.</td></tr> <tr> <td>Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.</td><td>Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.</td></tr> <tr> <td>Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan</td><td>Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan</td></tr> <tr> <td>Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal</td><td>Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan</td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistik dan tenukur.	Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.	Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan	Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan
Potensi Risiko	Mitigasi										
Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang akurat	Penyusunan RPD dan kalender kegiatan yang realistik dan tenukur.										
Terjadi kesalahan SPM/SP2D, retur, dan penurunan nilai kepatuhan IKPA.	Standarisasi dokumen, review berjenjang, dan pemanfaatan sistem keuangan secara optimal.										
Proses tender/pengadaan tidak sesuai timeline sehingga menurunkan kualitas penyerapan	Penjadwalan pengadaan secara cermat, monitoring rutin, dan penguatan tim pengadaan										
Monitoring dan pengendalian anggaran belum optimal	Evaluasi bulanan indikator IKPA dan penyesuaian strategi pelaksanaan										
Catatan											

Lampiran 8. SK Penetapan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025. |
| KESATU | : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Tatalaksana; 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 5. Penguatan Pengawasan; dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. |
| KETIGA | : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan; c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. |

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FABURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

PADJURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 9. SK Tim Penyusunan LAKIN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
JL. HI. Z. A. PAGAR ALAM NO. 1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA
TELEPON: (0721) 781776 FAKSIMILE : (0721) 705273
WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
NOMOR: 67.3/Kpts/OT.050/H.12.9/01/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna instrumen pertanian tepat terstandarisasi dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan pertanian di Lampung, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pertanian Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b pegawai dan atau pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap cakap duduk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2025;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 353.1/Kpts./KP.230/A/5/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Nomor: 59/Kpts/OT.410/H.12.9/05/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas penanggung jawab dan anggota tim kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun
Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 23 Mei 2025
Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP. 197412221999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Lampung
Nomor 67.3/Kpts/OT.050/H.12.9/01/2025
Tanggal 02 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
BRMP LAMPUNG 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Kegiatan
1	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D. NIP. 197412221999031001	Pembina
2	Reli Hevrizen, S.Pt., M.P NIP. 19830323 201101 1 010	Ketua
3.	Sofi Nur Arifah, S.Si. NIP. 199711162025052003	Sekretaris
4.	Arfi Irawati, S.P., M.Si NIP. 19740630 200701 1 001	Anggota
5.	Edwin Herdiansyah, A.Md., S.P. NIP. 19700217 199903 1 001	Anggota
6.	Hestiana Karyati, A.Md NIP. 197705142002122001	Anggota
7.	Asropi ,S.TP., M.Sc NIP. 19801208 200912 1 002	Anggota
8	Wiwit Priyono NIP. 19700428 200604 1 012	Anggota
9	Sugiyono NIP. 19740510 200701 1 002	Anggota
10	Dodi Setiwan, A.Md NIP. 19850725 201706 1 001	Anggota
11	Aldo Afrianda, A.Md NIP. 19920810 202203 1 001	Anggota

Kepala Balai,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP. 197412221999031001

Lampiran 10. Nilai IKPA (sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>)

Kementerian
Keuangan

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispenasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output					
1	Desember		017	018	567517 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG	Nilai	100.00	79.82	97.42	80.00	84.12	89.54	100.00	93.82	100%	0.00	93.82
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Awal	10.00	11.97	19.48	8.00	9.41	9.95	25.00				
						Nilai Akhir	89.91			92.77		100.00					

Halaman 1/1